



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Juncto Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

Кебәрлик индонезия номер 4431) сарафанын исәр чыгар
Тарих 3004 номер 132. Тарыхтан тарыхтан исәр
Белетилерин Делар (тарыхтан исәр) Кебәрлик индонезия
4. Индонезия-Индонезия номер 35. Тарих 3004. Индонезия
индонезия номер 4300).

Тарих 3003 номер 30. Тарыхтан тарыхтан исәр Кебәрлик
Белетилерин Делар (тарыхтан исәр) Кебәрлик индонезия
Керилерин Бонс Белетилерин чыгар Керилерин Белетилерин чы
3. Индонезия-Индонезия номер 6. Тарих 3003. Индонезия
Кебәрлик индонезия номер 4000).

Тарих 3006 номер 328. Тарыхтан тарыхтан исәр
Белетилерин Делар (тарыхтан исәр) Кебәрлик индонезия
3. Индонезия номер 38. Тарих 3006. Индонезия
Кебәрлик индонезия номер 3821).

Тарих 1000 номер 22. Тарыхтан тарыхтан исәр
Керилерин чыгар (тарыхтан исәр) Кебәрлик индонезия
Белетилерин Делар исәр Делар чыгар чыгар чыгар чыгар

Менделер : 1. Индонезия-Индонезия номер 38. Тарих 1000. Индонезия
1000 номер.

Белетилерин Делар Керилерин Бонс Белетилерин чыгар
Белетилерин Делар чыгар Керилерин Делар Белетилерин
110 элар (1) Индонезия-Индонезия номер 38. Тарих 3003. Индонезия

Белетилерин : 1. Индонезия-Индонезия номер 38. Тарих 3003. Индонезия

БЕЛЕТИЛЕРИН ДЕЛАР

ДЕЛАР БОНС БЕЛЕТИЛЕРИН

БЕЛЕТИЛЕРИН ДЕЛАР

ДЕЛАР

НОМЕР 38. ТАРИХ 3011

БЕЛЕТИЛЕРИН ДЕЛАР БЕЛЕТИЛЕРИН БОНС БЕЛЕТИЛЕРИН

БЕЛЕТИЛЕРИН БОНС БЕЛЕТИЛЕРИН

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan-peraturan:

Peraturan, Peraturan-peraturan dan Peraturan-peraturan Peraturan

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Mekanisme Kerja Pemerintah Nomor 21011.

Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Peraturan Pemerintah
Daerah dan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten
Kota Semarang dan Peraturan-peraturan tentang Peraturan-peraturan, Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Tata
Kebijakan Indonesia Nomor 4131).

Tahun 2003 Nomor 83, Peraturan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Peraturan Daerah Kabupaten Indonesia
Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan-peraturan Daerah
Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2003 tentang
Mekanisme Kerja Pemerintah Nomor 1234.

Indonesia Tahun 2002 Nomor 140, Peraturan Pemerintah
Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Indonesia Nomor 2334).

Mekanisme Kerja Pemerintah Tahun 2011 Nomor 83, Peraturan
Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan

7. Peraturan-peraturan Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Indonesia Nomor 2040).

Tahun 2003 Nomor 130, Peraturan Pemerintah Daerah
dan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Indonesia

6. Peraturan-peraturan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Peraturan
4438).

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Indonesia Nomor
Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Indonesia Tahun 2004

5. Peraturan-peraturan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peraturan
4444).

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Indonesia Nomor
Peraturan Daerah Kabupaten Indonesia Tahun 2008 Nomor 28

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan
Tahun 2008 tentang Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan

Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan
Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang peretribusian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Mencanangkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Retribusi tersebut.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

qatə' kecelənən qan/ınen rıknı ınen qıyqanənən səsle orıknı qan
18. Beşenkenen əqlər selenənən kecelen ınenenən qan ınenenən
kecelenən kecelenən

kecelenən kecelen ınenen qan ınenen ınen ınen kecelen ınenen
qan beşenənən ınenen ınen ınen ınen qıyqan ınenen ınenen
kecelenən ınenen beşenənən qan ınenen səsle ınenen ınenen beşenən
ınenen ınenenənən qan qan ınenen kecelenən ınenen ınenen ınenen

17. Beşenkenen əqlər selen ınenen beşenənən ınenen qıyqanən səsle kecelen
kecelen ınenen qan/ınen qıyqan

səsle ınenen ınenenən kecelen kecelen qan/ınen səsle əqlenənən
16. Səsle kecelen kecelen ınenen ınenen ınenen qıyqan ınenen
qıyqan kecelen ınenen ınenen ınenen ınenen ınenen ınenen

kecelenən beşenənən kecelen kecelen ınenen kecelen kecelen kecelen
ınenenən əqlər səsle kecelen kecelen ınenen ınenenən ınenen

15. Səsle kecelen kecelen ınenen ınenen ınenen qıyqan ınenen
ınenen kecelen kecelen ınenen ınenen ınenen ınenen ınenen

səsle kecelen kecelen ınenen ınenen ınenen ınenen ınenen kecelen

14. Səsle kecelen kecelen ınenen ınenen ınenen qıyqan ınenen əqlər
ınenen ınenen kecelen beşenənən ınenen qıyqan ınenen ınenen

ınenenən kecelen ınenen ınenen ınenen qıyqan səsle ınen ke kecelen
ınenen beşenənən ınenen beşenən kecelen ınenen ınenen qıyqan qıyqan

13. Səsle selen kecelen ınenen ınenen ınenen qıyqan ınenen əqlər
beşenənən beşenənən

ınenenən səsle kecelen beşenən kecelen kecelen ınenen kecelen səsle
qatə orıknı qan səsle kecelen beşenən ınenen kecelen ınenen

12. Beşenənən əqlər səsle ınenen kecelen ınenen qan beşenənən
qıyqan ınenen ınenen ınenen ınenen ınenen ınenen

ınenen ınenen ınenen kecelenən qan kecelenən ınenen səsle qatə

11. ınen ınenen əqlər ınen ınen qıyqan ınen qıyqan ınen beşenən
qıyqan ınen ınenen ınenen ınenen ınenen ınenen

ınenen ınenenən ınenen ınenen ınenen kecelenən ınenen ınenen qatə

10. ınen əqlər kecelen Beşenən ınenen kecelen ınenen ınenen qan beşenən
ınenen kecelen

ınenen ınenen ınenen kecelen kecelen ınenen kecelen qan ınenen
ınenen ınenenən səsle beşen ınenen ınenen ınenen ınenen qan

kecelen qatə beşen beşenən beşenən ınenen ınenen ınenen

kepatuhan pemenuhan kewajiban perretribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perretribusi daerah.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas

pembantu, rumah sakit, rumah sakit keliling, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, pukesmas pembantu, rumah sakit, rumah sakit keliling, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan dari pemerintah/pemerintah daerah dapat dikecualikan sebagai Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pengecualiannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, jenis alat alat yang digunakan, tingkat kesulitan, dan

perawatan, rumah sakit, rumah sakit keliling, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, rumah sakit, rumah sakit keliling, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendafatan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

(2) Orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan dari pemerintah/pemerintah daerah dapat dikecualikan sebagai Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pengeluarannya diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, jenis alat yang digunakan, tingkat kesulitan, dan

Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan tes narkotika dan obat terlarang di tempat lainnya sebagai berikut:
 - a. Biaya Pengganti *Testcit* Rp. 150.000,-
 - b. Biaya Operasional Rp. 100.000,-
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian objek dan jenis tarif retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kesempatan
Prinsip Yang Diikuti Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan asasan penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efisiensi pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan tes narkoba dan obat terlarang di tempat lainnya sebagai berikut:
 - a. Biaya Pengganti Tes Rp. 150.000,-
 - b. Biaya Operasional Rp. 100.000,-
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak bertentangan atau menentang rincian objek dan jenis tarif retribusi pelayanan kesehatan.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum

59287 13

ДОКЛАДЫ КОЛЛЕКЦИИ
ВЫШЕГО КЛАССА

Kepulauan dan Kepulauan Besar

63291 15

69287 11

528 10

МОНГОН ОРИГАН ЗАХИГАХ АЖАЛ

REVISED PAGE 11/11

БЕЛЫЙБОГІ БЕЛГАЛУВІІ БЕЛЗУМЬЛІВІІ КЕВЕРІНІВІІ

2252

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
dikutub berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu
pengangkutan.

Bagian Keempat
Prinsip Yang Harus Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek kesediaan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak bertentangan atau menambah rincian objek dan jenis tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB V
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 17

Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 18

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga; dan
- c. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 20

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan

5937 50

ПРОПОВИДЬ 1841 ГОДА

NUMBER 25/2000

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE FBI

我對這件 歷史 的 研究

DVB-FK17 CYLINDRICAL GLASS

EVIDENCE

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Karu Tanda Perbuduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis karu dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Diletakkan Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Karu Tanda Perbuduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Karu Tanda Perbuduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak bertentangan atau menambah rincian objek dan jenis tarif retribusi penggantian biaya cetak karu tanda perbuduk dan akta catatan sipil.

BAB VI
RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

RAB VI RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Waktu retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk pengkafan dan pengurusan pemakaman/pengabuan mayat; dan
b. sewa tempat pemakaman atau pemakaman/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 26

(1) Subjek Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memiliki pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh pemerintah daerah.
(2) Waktu Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau potongan Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, sebagai berikut:
 - a. Penguburan/Pemakaman:
 - 1) Anak-anak : Rp. 100.000,-
 - 2) Dewasa : Rp. 150.000,-
 - b. Sewa Tempat Makam:
 - 1) Biaya sewa kapling : Rp. 75.000,-/unit/tahun
 - 2) Biaya perawatan/rehabilitasi : Rp. 300.000,-/unit/sekali
 - 3) Biaya kebersihan : Rp. 120.000,-/tahun
 - c. Sewa Pembakaran/Pengabuan : Rp. 250.000,-/tahun
 - d. Sewa Tempat Kremasi : Rp. 75.000,-/tahun
 - e. Penyelenggaraan Prosesi Adat Penguburan : Rp. 5.000.000,-/paket

- e. Penyelenggaraan Bioskop Vdeo Pengiriman : Rp. 2'000'000'-\beker
 f. Sewa Tempat Kioskasi : Rp. 12'000'-\terpau
 g. Sewa Penyelenggaraan/Pengiriman : Rp. 320'000'-\terpau
 3) Biaya Kerjasama : Rp. 130'000'-\terpau
 3) Biaya Belanjaan/Kepemilikan : Rp. 300'000'-\lup\sekar
 1) Biaya Sewa Kioskasi : Rp. 12'000'-\lup\terpau
 p. Sewa Tempat Kioskasi :
 3) Denda : Rp. 120'000'-
 1) Anak-anak : Rp. 100'000'-
 q. Pengiriman/Pengiriman:
 setiap paket:

(1) Gaji dan biaya lain untuk pengiriman dan pengiriman Melayi

Rasio 30

Gaji dan Biaya Lain Karyawan

Rasio Kioskasi

Isa, bereskan lain pada anak-anak dengan biaya

- (3) Denda ini bereskan lain dengan biaya pembelian biaya pembelian
 pembelian, biaya lain, dan biaya lain
 (5) Biaya pembelian pembelian biaya lain (1) pembelian biaya pembelian dan
 pembelian, dan pembelian pembelian biaya pembelian pembelian
 biaya pembelian biaya lain pembelian, pembelian pembelian, setiap
 pembelian dan pengiriman Melayi pembelian pembelian
 (1) Biaya dan biaya lain pembelian lain pembelian pembelian

Rasio 30

Dan Biaya Lain Karyawan

Biaya Lain Biaya Lain Karyawan

Rasio Kioskasi

pengiriman biaya

gaji, pembelian, biaya dan pembelian pembelian pembelian dan
 pembelian pembelian biaya pembelian pembelian dan pengiriman Melayi

Rasio 30

Sisa Menjual, Biaya, pembelian dan

Rasio Kioskasi

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif retribusi pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 34

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan kedalam Jenis

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penerapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan lain yang mengatur tentang objek dan jenis tarif retribusi pemukiman dan pembangunan masyarakat.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memiliki pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 34

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan kedalam jenis

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Mobil Minibus dan Pick Up : Rp. 2.000,-/hari
 - b. Mobil Bus, Truck dan Sejenisnya : Rp. 3.000,-/hari
 - c. Sepeda Motor/Bentor (Roda Tiga) : Rp. 1.000,-/hari
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

RECEIVED THE SECRETARY OF THE ARMY

BRUCE K. HOFER

2000 1000000 10000000

ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

water pump.

65281 32

One hundred and thirty-two

REFERENCES

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Golongan Retribusi

Pasal 41

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Ruang dan Waktu Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 39

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikorelasikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMK, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Golongan Retribusi

Pasal 41

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB IX
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh

69887 42

Уставот, од кој се одредуваат овие датоци, не е закон.

REFUGEE WOUNDS

KELEIWOŌI ʻŌHIOHŌI KĀHĀHŌI KĀHĀHŌI KĀHĀHŌI

BVB DE

1929 年

SECRETARY OF THE ARMY

NOTED YES/NO

DATE RECEIVED JULY 1963

Блаженъ донѣ живитъ душаи покаяньемъ своимъ

256000 HCG 1387

Pasal 46

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 48

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas

Pasal 46

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memiliki pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 48

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Diatur Dalam Penetapan Struktur

Dasar Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB X

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak bertentangan atau menambah rincian objek dan jenis tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB X

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Waktu Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanganan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan

penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 55

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis, bobot dan jumlah alat yang diperiksa.

Bagian Keempat Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan

THE JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

Будући део ратне историје Југославије изградити
радије касније

1950

ГОРЬКИЙ КОСМОС
НАШЕ ВРЕМЯ

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagai berikut:
 - a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya:
 - 1) Isi 1 s/d 25 liter Rp. 5.000,-
 - 2) Isi lebih dari 25 liter Rp. 7.500,-
 - b. Jenis Dry Powder (serbuk) CO₂, Halon dan sejenisnya:
 - 1) Berat 1 s/d 6 Kg Rp. 10.000,-
 - 2) Berat 7 Kg s/d 20 Kg Rp. 12.500,-
 - 3) Berat lebih dari 20 Kg Rp. 25.000,-
 - c. Jenis Hidrant Sprikler dan sejenisnya:
 - 1) Ukuran 1 Inc Rp. 12.500,-
 - 2) Ukuran lebih dari 1 Inc Rp. 17.500,-
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian objek dan jenis tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB XI

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

40291 26

highest order simplex that meets the

1305130 4620/CH

KELEBİBOSİ DEMOCRATİK HİVAY ÇELİK BELV

HVB XI

БЕЛОРУСКИ КАРСКИНСКИ

31. HKTUWU K-PIR QSU I JPC KD' TX'200'

C. ԳԵՐՈՅ ԽՈՐԵՍԴՈՒ ԶԽԻՂԵԼ ՇՈՒ ԵՃԵՄԵՐՆԵՐ:

- 3) ВГЛАН 16РДН 934 30 КЭ КД: 32'000'-

- 5) BSMC 1 K² s/q 50 K² Bb 15'200"

- 1) Belski 12/99 K8 Kb' 10'000'

- 3) (e) (epip qsu) 32 ixel kb' 1'200'

КЕРЭКСЛЭН СӨРӨҢҮН ДӨЛҮҮТЭ

59291 28

SECRETARY OF THE ARMY

RUSSIAN REPORTS

Pasal 60

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan peta dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 62

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, jumlah, dan skala peta yang diterbitkan.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

memberi hak dan kewajiban yang sama

(1) Anggota yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama

Bagian 24

Bagian 24

Bagian 24

Bagian 24

Bagian 24

Bagian 25

Bagian 25

Bagian 25

Bagian 25

Bagian 26

Bagian 26

Bagian 26

Bagian 26

Bagian 26

Bagian 26

Bagian 26

Bagian 26

Bagian 27

Bagian 27

Bagian 27

Bagian 28

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

BAB XII

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan

270219

договор, ордера, справки для меня не являются

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

БЕЛЫНОВИ БЕМАЕРДІҰҢЫ БҒА/ҮЛГІ БЕМАЕРДОҰҢ КҮНОЗ

XVb XII

RECEIVED THE DEPARTMENT OF THE ARMY

РБС:ИР КС:ИДМ

- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 69

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jenis pelayanan dan volume.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 72

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagai berikut:

күктәс сәрәбәт рәңкит:

(1) Әлүктәт қән рәсәтләнә тәңд кәтпәтәт бәлүсәтәт қән\әтәт бәлүсәтәт

Бәсәт 15

Әлүктәт қән рәсәтләнә тәңд кәтпәтәт

Бәсәт кәтпәтәт

тәсәт бәсәтәтәт тәңд рәләнә тәңд кәтпәтәт сәрәбәт рәләнә

(2) Рәләнә рәт бәсәтәтәт тәңд сәсәтләнәтәт тәңд кәтпәтәтәт рәләнә бәлүсәтәтәт бәсәтләнәтәт рәләнә рәләнәтәт қән рәләнә тәңд

(3) Рәләнә сәрәбәтәтәтәт қән\әтәт бәсәтәтәт (1) тәңд рәләнә сәсәтәт қән сәсәтәтәт бәсәтәтәтәт сәсәт бәсәтәтәт

тәсәт тәңд рәләнәтәтәт кәтпәтәтәт тәңд кәтпәтәтәт сәсәт кәтпәтәт қән бәлүсәтәтәт кәтпәтәтәт қән\әтәт қән\әтәт тәңд кәтпәтәтәт бәлүсәтәтәт қән\әтәт

(1) Рәләнәтәт қән\әтәт қән\әтәт бәсәтәтәт тәңд кәтпәтәтәт бәлүсәтәтәт қән\әтәт

Бәсәт 16

Рәләнә рәсәтләнә тәңд кәтпәтәт

Рәләнәтәт тәңд рәләнәтәт бәсәтәтәт әлүктәтәт

Бәсәт кәтпәтәт

қән\әтәт рәләнәтәтәт тәңд бәсәтәтәт қән\әтәт

тәңд кәтпәтәтәт тәңд кәтпәтәтәт бәлүсәтәтәт қән\әтәт бәлүсәтәтәт кәтпәтәтәт

Бәсәт 17

Сәтәт кәтпәтәт тәңд кәтпәтәт бәсәтәтәт тәңд

Бәсәт кәтпәтәт

кәтпәтәтәт тәңд кәтпәтәтәт

кәтпәтәтәт бәлүсәтәтәт қән\әтәт бәлүсәтәтәт кәтпәтәтәт қән\әтәт кәтпәтәтәт

Бәсәт 18

Сәтәт кәтпәтәт

Бәсәт кәтпәтәт

бәсәтәтәт кәтпәтәтәт бәлүсәтәтәт қән\әтәт бәлүсәтәтәт кәтпәтәтәт

тәңд кәтпәтәтәт бәсәтәтәт кәтпәтәтәт тәңд кәтпәтәтәт тәңд кәтпәтәтәт

(2) Тәңд кәтпәтәтәт бәлүсәтәтәт қән\әтәт бәлүсәтәтәт кәтпәтәтәт сәсәтәтәт

b. Biaya Jasa Pembuangan : Rp. 25.000,-/M³

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

BAB XIII

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 73

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pelayanan pengelolaan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan

1591-10

1970s' culture of protest was being replaced

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

REF ID: A66074

HYD 2321

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 76

Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jenis dan volume limbah cair.

Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 79

97 12849

2. Peraturan dan keputusan dari keputusan

DEKUN KOTUN

14381 28

THE BOSTONIAN JULY ECLIPSE

Garrett, and Dorian began counseling students.

буфен кеубуна

77 5885

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ РЕСПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

notion of \mathcal{C}

Q1100000

15291 29

ГОЛОВНИЙ КОМПЬЮТЕР

NOTED EGGS

Բեռնարդին Դաթեր Շահ

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

BAB XIV

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 80

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau

68857 85

63287 81

09 18297

newly offered samples and their contents

DAVID HORTON

SELEKSI BERGADAMUK LERU' LERU' DITING

BYE ZIA

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 83

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jumlah dan jenis alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ditera ulang.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan
atau pemotong Retribusi Tera/Ulang.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 83

Retribusi Pelayanan Tera/Ulang digolongkan kedalam jenis Retribusi
Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Ulang diukur
berdasarkan jumlah dan jenis alat ukur, takar, timbang, dan pengukurannya
(UTTP) yang ditera/ditera ulang.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Diletakkan Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Ulang
Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Ulang
sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB XV

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 87

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
 - e. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka program bantuan sosial;
 - f. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka program pengembangan sumberdaya aparatur daerah yang dianggarkan secara penuh dalam APBD/APBN.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan dari Pemerintah Daerah.

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penerapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak bertentangan atau menentang rincian objek dan jenis tarif Retribusi Pelayanan Tata Ulang.

BAB XV

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wilayah retribusi

Pasal 87

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikembangkan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
 - e. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka program bantuan sosial.
 - f. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka program pengembangan sumberdaya aparatur daerah yang dilaksanakan secara penuh dalam APBD/APBN.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan dan pelatihan.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 90

Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pendidikan.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 93

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Biological Sciences
Humanities

SECRET

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan jenis tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan.

BAB XVI

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 95

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 97

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan kedalam jenis

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sepanjang tidak bertentangan atau menambah beban objek dan jenis tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan.

BAB XVI

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib retribusi

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 95

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kenyamanan umum.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 97

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan presentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan setiap pengendalian sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara Telekomunikasi.
- (2) Pengenaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali pelaksanaan layanan pengendalian menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menera Telekomunikasi dikur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diukur tahun dan bangunan atau penjualan kotor atau biaya operasional yang nilainya dikalikan dengan frekuensi penggunaan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Diantar Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menera Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek kredibilitas dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menera Telekomunikasi ditetapkan setiap pengendalian sebesar 3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menera Telekomunikasi.
- (2) Pengenaan retribusi pengendalian menera telekomunikasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan layanan pengendalian menera telekomunikasi oleh pemertintah daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian objek dan jenis tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB XVII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 101

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

BAB XVIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 102

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 103

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran atau dapat dimintakan penundaan pembayarannya.
- (3) Pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran dapat dilakukan setelah disetujuinya permohonan yang tertulis yang diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati.
- (4) Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Telekomunikasi

menambah jenis lain Retribusi Pengambilan Menara dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai tidak menjadi atau (2) diterapkan dari Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan

BAB XVII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 101

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang tertentu dipungut di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

BAB XVIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 102

- (1) Pemungutan retribusi dilarang dibarengkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Dokumen lain yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kartu, kupon, dan kartu pengenal.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Pembayaran, Tempat Pembayaran,

Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 103

- (1) Pembayaran Retribusi yang tertunggak harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang tertunggak dapat dibayarkan secara angsuran atau dapat dimutakhirkan penundaan pembayarannya.
- (3) Pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran dapat dilakukan setelah disetujui permohonan yang tertulis yang diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati.
- (4) Tata cara pemenuhan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 104

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 105

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 106

Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat digunakan/dinikmatinya objek retribusi dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
PENAGIHAN

Pasal 107

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan

БЕЛОРУСІЎ

BVB XXI

00112249

501 E289

WASV KELEBIRSI: DVM SWVL JENGLAMOMAY KELEBIRSI:

HYB XX

STANKE VDRINISLEVI

EVB XIX

BAB XXII
KEBERATAN

Pasal 108

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (8) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 109

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

Pasal 110

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXIII

PEMBETULAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 111

- (1) Atas permohonan Wajib retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat dapat membetulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan retribusi daerah.
- (2) Bupati atau pejabat dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perretribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD atau STRD yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan

INDEX NAME

BAB XXIV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN DALAM
HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA
DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 112

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan dan pengurangan retribusi, dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
 - c. berkaitan dengan program usaha pengentasan kemiskinan dari pemerintah;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi

BAB XXIV

PERKEMBANGAN, PENGURANGAN, DAN PEMERBAHAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS FOKUS RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 112

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan dan pengurangan retribusi dalam hal:
- a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian sanksi kepada masyarakat/wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
 - c. berkaitan dengan program usaha pengentasan kemiskinan dari pemerintah;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDGB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang Retribusi.

BAB XXV
PENGHAPUSAN PIUTANG DAN KEDALUWARSA

Pasal 114

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 115

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

KSCIRINGU

БЕЛОРУССКАМУ БІБЛІАНА ДУМА ПЕРДВІСТАВІТ
БІВ ХХІ.

BAB XXVI
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 116

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD berdasarkan rencana target penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula untuk pemberian insentif pemungutan.
- (4) Pengalokasian anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dalam APBD dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja.

BAB XXVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pasal 117

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 118

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah.

BAB XXVI PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 116

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD berdasarkan rencana target penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula untuk pemberian insentif pemungutan.
- (4) Penyalokan anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dalam APBD dikembalikan ke dalam belanja langsung yang diutamakan berdasarkan jenis belanja.

BAB XXVII INSentif PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pasal 117

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 118

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Petrunan Daerah ini diwujudkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 119

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perretribusi Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

KELEMENOVN BEMADIKOVA

BVB XXIX

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perretribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perretribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Pemungutan Retribusi atas jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan rincian objek Retribusi tidak dapat dilakukan sepanjang

6847 133

КРЕДІТОВА БІЗНЕС-ІНТЕРН

BVB XXII

BELOW: 1000 A.D. ON

893 XOX

belum atau tidak lagi tersedia dan/atau tidak adanya pelayanan Retribusi dimaksud.

BAB XXXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur untuk masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 124

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2009;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Perhubungan Darat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Persalinan Desa dan Pos Kesehatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Bidang Perhubungan.

ՀԱՅԿՐԱՆՔ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՇԽԱՐԱԿՈՒՄԸ

[illegible]

159291 153

КЕЛЕКОВИ БЕМОЛА

DVB XXXIII

Pasal 125

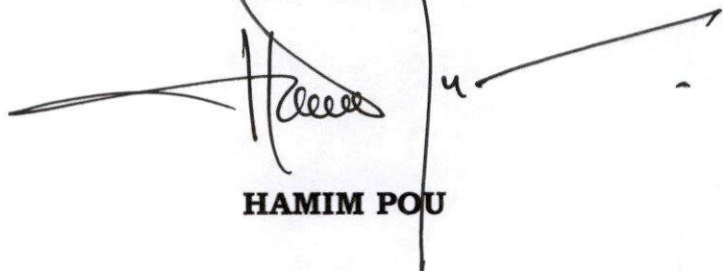
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 November 2011

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 21 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, Msi

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641212 199103 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR 28

LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

PERIHAL: STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

A PELAYANAN RAWAT JALAN

A.1 PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
1	Pemeriksaan				
	a. Dokter Spesialis	9,000	8,800	2,200	20,000
	b. Dokter Umum	6,750	6,600	1,650	15,000
2	Konsultasi Spesialis	6,750	6,600	1,650	15,000
3	Konsultasi Gizi	6,750	6,600	1,650	15,000

A.2 PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
1	Pemeriksaan				
	Dokter Umum	9,900	9,680	2,420	22,000
2	Konsultasi Spesialis	8,100	7,920	1,980	18,000
3	Gizi	3,150	3,080	770	7,000

A.3 PENGUJIAN KESEHATAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
1	Pemeriksaan kesehatan umum	27,500	18,000	4,500	50,000

A.4 Tarif retribusi untuk pemeriksaan kesehatan khusus, disesuaikan dengan tarif dari setiap pemeriksaan yang dibutuhkan.

B. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

Paket pelayan satu hari (One Day Care)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
1	Pelayanan one day care	38,500	25,200	6,300	70,000

C. PELAYANAN RAWAT INAP

C1 Ruang perawatan Biasa

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			Dr. SPESIALIS	Dr. UMUM	PERAWAT	
1	Kelas III	15,750	10,588	1,925	6,738	35,000
2	Kelas II	30,000	16,500	3,000	10,500	60,000
3	Kelas I B	45,000	24,750	4,500	15,750	90,000
4	Kelas I A	55,000	30,250	5,500	19,250	110,000
5	VIP B	82,500	37,125	6,750	23,625	150,000
6	VIP A	110,000	49,500	9,000	31,500	200,000
7	VIP Khusus	137,500	61,875	11,250	39,375	250,000

C2 Ruang perawatan khusus

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			Dr. SPESIALIS	Dr. UMUM	PERAWAT	
1	Kelas Khusus/Isolasi	18,000	14,850	2,700	9,450	45,000
2	IMC/HCU/Perawatan Lain Yang Setara	75,000	41,250	7,500	26,250	150,000
3	ICU/NICU/PICU	165,000	74,250	13,500	47,250	300,000
4	ICCU	192,500	86,625	15,750	55,125	350,000

D. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

D.1 Pemeriksaan Laboratorium

D.1.1 Pemeriksaan Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	ANALISIS	
1	Kelas III	10,500	2,700	1,800	15,000
2	Kelas II/Rawat Jalan/ UGD	12,600	3,240	2,160	18,000
3	Kelas I	14,000	3,600	2,400	20,000
4	VIP / ICU / ICCU	17,500	4,500	3,000	25,000

D.1.2 Pemeriksaan Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	ANALISIS	
1	Kelas III	18,200	4,680	3,120	26,000
2	Kelas II/Rawat Jalan/ UGD	22,400	5,760	3,840	32,000
3	Kelas I	23,800	6,120	4,080	34,000
4	VIP / ICU / ICCU	25,200	6,480	4,320	36,000

D.1.3 Pemeriksaan Cangghih

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	ANALISIS	
1	Kelas III	31,500	8,100	5,400	45,000
2	Kelas II/Rawat Jalan/ UGD	38,500	9,900	6,600	55,000
3	Kelas I	40,600	10,440	6,960	58,000
4	VIP / ICU / ICCU	44,100	11,340	7,560	63,000

D.1.5 Pemeriksaan Narkoba

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	ANALISIS	
1	Pemeriksaan Narkoba	75,000	15,000	10,000	100,000

Tarif pemeriksaan laboratorium untuk pasien ICU/ICCU yang dirawat dikelas III dikenakan tarif sama dengan tarif kelas II

D.2 Pemeriksaan Radiodiagnostik

D.2.1 Pemeriksaan Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	RADIO.	
	Kelas III	33,600	10,080	4,320	48,000
	Kelas II	37,800	11,340	4,860	54,000
	Kelas I	42,000	12,600	5,400	60,000
	VIP / VIP KHUSUS	52,500	15,750	6,750	75,000
	ICCU / ICU	59,500	17,850	7,650	85,000

D.2.2 Pemeriksaan Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	RADIO.	
	Kelas III	52,500	15,750	6,750	75,000
	Kelas II	63,000	18,900	8,100	90,000
	Kelas I	73,500	22,050	9,450	105,000
	VIP / VIP KHUSUS	84,000	25,200	10,800	120,000
	ICCU / ICU	91,000	27,300	11,700	130,000

D.2.3 Pemeriksaan Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	RADIO.	
	Kelas III	112,000	33,600	14,400	160,000
	Kelas II	140,000	42,000	18,000	200,000
	Kelas I	161,000	48,300	20,700	230,000
	VIP / VIP KHUSUS	178,500	53,550	22,950	255,000
	ICCU / ICU	210,000	63,000	27,000	300,000

D.2.4 Pemeriksaan Besar

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	RADIO.	
	Kelas III	220,500	66,150	28,350	315,000
	Kelas II	245,000	73,500	31,500	350,000
	Kelas I	280,000	84,000	36,000	400,000
	VIP / VIP KHUSUS	315,000	94,500	40,500	450,000
	ICCU / ICU	350,000	105,000	45,000	500,000

D.2.5 Pemeriksaan USG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	RADIO.	
	Kelas III	45,500	13,650	5,850	65,000
	Kelas II	59,500	17,850	7,650	85,000
	Kelas I	66,500	19,950	8,550	95,000
	VIP / VIP KHUSUS	77,000	23,100	9,900	110,000
	ICCU / ICU	77,000	23,100	9,900	110,000

D.2.5 Pemeriksaan CT. SCAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	RADIO.	
	Kelas III	350,000	105,000	45,000	500,000
	Kelas II	395,500	118,650	50,850	565,000
	Kelas I	490,000	147,000	63,000	700,000
	VIP / VIP KHUSUS	630,000	189,000	81,000	900,000
	ICCU / ICU	665,000	199,500	85,500	950,000

Tarif pemeriksaan radiologi untuk pasien ICU/ICCU yang dirawat dikelas III dikenakan tarif sama dengan tarif kelas II

D.3 Pelayanan Konsultasi Radiologi

E.1 TINDAKAN MEDIK

E.1 Paket Tindakan Medis (PIII)

E.1.1 Paket III Umum

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
1	Kelas III	4,000	4,800	1,200	10,000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	6,000	4,800	1,200	12,000
3	Kelas I	7,000	5,600	1,400	14,000
4	VIP, IMC, HCU, ICU, NICU, PICU, ICCU	8,500	6,800	1,700	17,000
5	VIP Khusus	10,000	8,000	2,000	20,000

E.1.2 Paket III A

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
1	Kelas III	10,800	12,960	3,240	27,000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	16,500	13,200	3,300	33,000
3	Kelas I	17,000	13,600	3,400	34,000
4	VIP, IMC, HCU, ICU, NICU, PICU, ICCU	17,500	14,000	3,500	35,000
5	VIP Khusus	19,500	15,600	3,900	39,000

E.1.3 Paket III B

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
1	Kelas III	26,000	31,200	7,800	65,000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	39,000	31,200	7,800	78,000
3	Kelas I	42,500	34,000	8,500	85,000
4	VIP, IMC, HCU, ICU, NICU, PICU, ICCU	46,500	37,200	9,300	93,000
5	VIP Khusus	48,500	38,800	9,700	97,000

E.1.4 Paket III C

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
1	Kelas III	100,000	120,000	30,000	250,000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	150,000	120,000	30,000	300,000
3	Kelas I	157,500	126,000	31,500	315,000
4	VIP, IMC, HCU, ICU, NICU, PICU, ICCU	162,500	130,000	32,500	325,000
5	VIP Khusus	170,000	136,000	34,000	340,000

E.1.5 Paket III D

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			DOKTER	ANESTESI	PERAWAT	
1	Kelas III	180,000	151,200	75,600	43,200	450,000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	270,000	151,200	75,600	43,200	540,000
3	Kelas I	285,000	159,600	79,800	45,600	570,000
4	VIP / VIP KHUSUS	300,000	168,000	84,000	48,000	600,000

E.2 Tindakan Medik Operatif

E.2.1 Tindakan Medik Operatif Kelompok I

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			DOKTER	ANESTESI	PERAWAT	
1	Kelas III	480,000	403,200	201,600	115,200	1,200,000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	700,000	392,000	196,000	112,000	1,400,000
3	Kelas I	750,000	420,000	210,000	120,000	1,500,000
4	VIP / VIP KHUSUS	800,000	448,000	224,000	128,000	1,600,000

E.2.2 Tindakan Medik Operatif Kelompok II

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			DOKTER	ANESTESI	PERAWAT	
1	Kelas III	600,000	504,000	252,000	144,000	1,500,000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	937,500	525,000	262,500	150,000	1,875,000
3	Kelas I	975,000	546,000	273,000	156,000	1,950,000
4	VIP / VIP KHUSUS	1,050,000	588,000	294,000	168,000	2,100,000

E.2.3 Tindakan Medik Operatif Kelompok III

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			DOKTER	ANESTESI	PERAWAT	
1	Kelas III	880,000	739,200	369,600	211,200	2,200,000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	1,320,000	739,200	369,600	211,200	2,640,000
3	Kelas I	1,375,000	770,000	385,000	220,000	2,750,000
4	VIP / VIP KHUSUS	1,450,000	812,000	406,000	232,000	2,900,000

Tarif Retribusi untuk tindakan operasi emergency (mendadak/darurat) ditentukan sebagai berikut :

E.2.4 Tindakan Medik Operatif Kelompok Khusus

E.2.4.1 Kelas III

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
				DOKTER	ANASTESI	PERAWAT	
I	Anak	1 Atresia Esofagus	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		2 Dunamel	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		3 PSA	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		4 Splenokomi Parsial	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
II	Digestif	1 Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		2 Koledoko Jejunoskomi	2,250,000	1,540,000	770,000	440,000	5,000,000
		3 Laparaskopik Kolisistektomi	2,250,000	1,540,000	770,000	440,000	5,000,000
		4 Mega Kolon Hierchprung	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		5 Miles Operation	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		6 Pangkrektetomi	2,250,000	1,540,000	770,000	440,000	5,000,000
		7 Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		8 Reseksi Hepar	2,250,000	1,540,000	770,000	440,000	5,000,000
		9 Spleneektomi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
III	Kebidanan / Obgyn	1 Debulking	2,250,000	1,540,000	770,000	440,000	5,000,000
		2 Histerektomy Radikal	2,700,000	1,848,000	924,000	528,000	6,000,000
		3 Laparaskopiy Operatif	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		4 Operasi Tumor Ganas Ovarium	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		5 Surgical Staging	2,250,000	1,540,000	770,000	440,000	5,000,000
		6 Vulvektomi	2,700,000	1,848,000	924,000	528,000	6,000,000
IV	Mata	1 Ablatio Retina	1,350,000	924,000	462,000	264,000	3,000,000
		2 Dekompresi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		3 Fraktur Tripodo / Multipele	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		4 Orbitomi Lateral	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		5 Rekonstruksi Kelopak Mata	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		6 Rekonstruksi Orbita Congenital	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		7 Tripel Produser Keratoplasti dengan Galaukoma	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		8 Rekonstruksi Saket Berat	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		9 Vitrektomi	1,350,000	924,000	462,000	264,000	3,000,000
V	Onkology	1 Deseksi Kelenjar Inguinal	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		2 Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		3 Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		4 Glosektomi Totalis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		5 Hemiglosektomi + RND	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		6 Hemipelvektomi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		7 Maksilektomi Totalis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		8 Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		9 Mandibulektomi Totalis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		10 Mastektomi Radikal	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		11 Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		12 Pembedahan Forequarter	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
VI	Ortopedi	1 Amputasi Forequarter	1,350,000	924,000	462,000	264,000	3,000,000
		2 Amputasi Hind Quarter	1,350,000	924,000	462,000	264,000	3,000,000
		3 Arthroscopy	1,350,000	924,000	462,000	264,000	3,000,000
		4 Fraktur Yang Kompleks (Fraktur Asetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		5 Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) Tidak Termasuk Alat	1,350,000	924,000	462,000	264,000	3,000,000
		6 Microsurgery	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		7 Scoliosis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		8 Spondilitis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
VII	Plastik	1 Faraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		2 Free Flap Surgery	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		3 Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		4 Le-Ford Advancemen Surgery	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		5 Orthognatic Surgery	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		6 Replantasi	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
VIII	Saraf	1 Complicated Functional Neuro :					
		a. Stereotaxy Sederhana	5,625,000	3,850,000	1,925,000	1,100,000	12,500,000
		b. Stereotaxy Kompleks	6,300,000	4,312,000	2,156,000	1,232,000	14,000,000
		c. Percutaneous Kordotomi	4,725,000	3,234,000	1,617,000	924,000	10,500,000
		d. P.Paraverteb / Visceral Block	4,050,000	2,772,000	1,386,000	792,000	9,000,000
		2 Dekompresi Syaraf Tepi	2,925,000	2,002,000	1,001,000	572,000	6,500,000
		3 Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		4 Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
		a. Operasi Kurang 1 Jam	2,925,000	2,002,000	1,001,000	572,000	6,500,000
		b. Operasi Lebih 1 Jam	3,375,000	2,310,000	1,155,000	660,000	7,500,000
		5 Kraniotomi + Bedah Mikro					
		a. Operasi Kurang 4 Jam	5,175,000	3,542,000	1,771,000	1,012,000	11,500,000
		b. Operasi Lebih 4 Jam	5,850,000	4,004,000	2,002,000	1,144,000	13,000,000

		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
		9.1	Bedah Mikro					
		a.	Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	6,075,000	4,158,000	2,079,000	1,188,000	13,500,000
		b.	N. Cranialis / Spinalis Perifer	5,175,000	3,542,000	1,771,000	1,012,000	11,500,000
		9.2	Bedah Konvensional	4,050,000	2,772,000	1,386,000	792,000	9,000,000
		10	Neurektomi / Neurolise	2,925,000	2,002,000	1,001,000	572,000	6,500,000
		11	Operasi Tulang Punggung :					
		11.1	Fusi Korpus Vertebra					
		a.	Approach Posterior	5,625,000	3,850,000	1,925,000	1,100,000	12,500,000
		b.	Approach Anterior	4,050,000	2,772,000	1,386,000	792,000	9,000,000
		11.2	Laminektomi					
		a.	Sederhana	4,050,000	2,772,000	1,386,000	792,000	9,000,000
		b.	Kompleks	4,725,000	3,234,000	1,617,000	924,000	10,500,000
		11.3	Tomor Spinal					
		a.	Daerah Kranioplasti	5,625,000	3,850,000	1,925,000	1,100,000	12,500,000
		b.	Daerah Servikal	4,725,000	3,234,000	1,617,000	924,000	10,500,000
		c.	Daerah Torakolumbal	4,050,000	2,772,000	1,386,000	792,000	9,000,000
		12	Pemasangan Fiksasi Interna	3,600,000	2,464,000	1,232,000	704,000	8,000,000
		13	Pemasangan Pintas VA /VP Shunt	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	2,250,000	1,540,000	770,000	440,000	5,000,000
IX	THT	15	Rekontruksi Meningokel					
		a.	Kranial (anterior/posterior)	4,050,000	2,772,000	1,386,000	792,000	9,000,000
		b.	Spina Bifida	4,050,000	2,772,000	1,386,000	792,000	9,000,000
		16	Simple Fungtional Nsurgery					
		a.	Percutaneus Rhizotomi PRGR	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		b.	Perc Facet Denervation dll	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		17	Ventrikustomi / VE Drainase	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		1	Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		2	Glosektomi Total	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		3	Laringektomi	1,350,000	924,000	462,000	264,000	3,000,000
X	Urologi	4	Myocutaneus Flap /Pectoral Mayor	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		5	Radikal Neck Desction	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		6	Stapendektomi	1,350,000	924,000	462,000	264,000	3,000,000
		7	Temporal Bone Resection	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		8	Timpano Plasti	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		1	Adrenalektomi Abdominotorakal	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		2	Bladder Neck Incision	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		3	Diseksi KGB Pelvis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		4	Divertikulektomi Vesika	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		5	Epididimovasoktomi	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		6	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		8	Horseshoe Kidney Koreksi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		9	Ileal Condoit (Brikker)	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		12	Longitudinal Nefrolithotomi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		13	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		14	Nefrektomi Partial	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		15	Nefro Urektomi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		16	Nefrostomi Perkutan	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		17	Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		18	Radikal Cystektomi	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		19	Radikal Nefrektomi	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		20	Radikal Prostatektomi	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		21	Rekonstruksi Renovaskuler	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		22	Repair Vesico Vagina Fistel Complex	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		23	RPLND	3,150,000	2,156,000	1,078,000	616,000	7,000,000
		24	TUR Prostat	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		25	TUR Tumor Buli - Buli	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		26	Ureteroneo Cystosthomi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		27	Uretroplasty	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		28	URS	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
XI	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		2	Arteri Carotis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		3	Arteri Renalis Stenosis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		4	Grating Pada Arterial Insufisiensi	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		5	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Tehnik Operasi Khusus	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		6	Shunting :	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		a.	Femorialis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		b.	Poplitea / Tibialis	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000
		c.	Splenomegali	1,800,000	1,232,000	616,000	352,000	4,000,000

		3	PSA	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		4	Splenokomi Parsial	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
II	Digestif	1	Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		2	Koledoko Jejunoskomi	2,875,000	1,610,000	805,000	460,000	5,750,000
		3	Laparaskopik Kolisistektomi	2,875,000	1,610,000	805,000	460,000	5,750,000
		4	Mega Kolon Hierchprung	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		5	Miles Operation	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		6	Pangkrektetomi	2,875,000	1,610,000	805,000	460,000	5,750,000
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		8	Reseksi Hepar	2,875,000	1,610,000	805,000	460,000	5,750,000
		9	Spleneektomi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
III	Kebidanan / Obgyn	1	Debulking	2,875,000	1,610,000	805,000	460,000	5,750,000
		2	Histerektomy Radikal	3,450,000	1,932,000	966,000	552,000	6,900,000
		3	Laparaskopiy Operatif	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		5	Surgical Staging	2,875,000	1,610,000	805,000	460,000	5,750,000
		6	Vulvektomi	3,450,000	1,932,000	966,000	552,000	6,900,000
IV	Mata	1	Ablatio Retina	1,725,000	966,000	483,000	276,000	3,450,000
		2	Dekompresi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		3	Fraktur Tripodo / Multipele	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		4	Orbitomi Lateral	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		5	Rekonstruksi Kelopak Mata	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		6	Rekonstruksi Orbita Congenital	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		7	Tripel Produser Keratioplasti dengan Galaukoma	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		8	Rekonstruksi Saket Berat	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		9	Vitrektomi	1,725,000	966,000	483,000	276,000	3,450,000
V	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		2	Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		4	Glosektomi Totalis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		5	Hemiglosektomi + RND	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		6	Hemipelvektomi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		7	Maksilektomi Totalis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		8	Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		9	Mandibulektomi Totalis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		10	Mastektomi Radikal	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		12	Pembedahan Forequarter	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
VI	Ortopedi	1	Amputasi Forequarter	1,725,000	966,000	483,000	276,000	3,450,000
		2	Amputasi Hind Quarter	1,725,000	966,000	483,000	276,000	3,450,000
		3	Arthroscopy	1,725,000	966,000	483,000	276,000	3,450,000
		4	Fraktur Yang Kompleks (Fraktur Asetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		5	Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) Tidak Termasuk Alat	1,725,000	966,000	483,000	276,000	3,450,000
		6	Microsurgery	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		7	Scoliosis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		8	Spondilitis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
VII	Plastik	1	Faraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		2	Free Flap Surgery	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		3	Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		4	Le-Ford Advancemen Surgery	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		5	Orthognatic Surgery	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		6	Replantasi	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
VIII	Saraf	1	Complicated Functional Neuro :					
			a. Stereotaxy Sederhana	7,187,500	4,025,000	2,012,500	1,150,000	14,375,000
			b. Stereotaxy Kompleks	8,050,000	4,508,000	2,254,000	1,288,000	16,100,000
			c. Percutaneous Kordotomi	6,037,500	3,381,000	1,690,500	966,000	12,075,000
			d. P.Paraverteb / Vicerat Block	5,175,000	2,898,000	1,449,000	828,000	10,350,000
		2	Dekompresi Syaraf Tepi	3,737,500	2,093,000	1,046,500	598,000	7,475,000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
			a. Operasi Kurang 1 Jam	3,737,500	2,093,000	1,046,500	598,000	7,475,000
			b. Operasi Lebih 1 Jam	4,312,500	2,415,000	1,207,500	690,000	8,625,000
		5	Kraniotomi + Bedah Mikro					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	6,612,500	3,703,000	1,851,500	1,058,000	13,225,000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	7,475,000	4,186,000	2,093,000	1,196,000	14,950,000
		6	Kranitomi + Endoskopi	6,612,500	3,703,000	1,851,500	1,058,000	13,225,000
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	5,175,000	2,898,000	1,449,000	828,000	10,350,000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	6,037,500	3,381,000	1,690,500	966,000	12,075,000
		8	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	5,175,000	2,898,000	1,449,000	828,000	10,350,000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	6,037,500	3,381,000	1,690,500	966,000	12,075,000
		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
			9.1 Bedah Mikro					
			a. Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	7,762,500	4,347,000	2,173,500	1,242,000	15,525,000
			b. N. Cranialis / Spinalis Perifer	6,612,500	3,703,000	1,851,500	1,058,000	13,225,000
			9.2 Bedah Konvensional	5,175,000	2,898,000	1,449,000	828,000	10,350,000
		10	Neurektomi / Neurolyse	3,737,500	2,093,000	1,046,500	598,000	7,475,000
		11	Operasi Tulang Punggung :					

		11.3 Tomor Spinal					
		a. Daerah Kranioplasti	7,187,500	4,025,000	2,012,500	1,150,000	14,375,000
		b. Daerah Servikal	6,037,500	3,381,000	1,690,500	966,000	12,075,000
		c. Daerah Torakolumbal	5,175,000	2,898,000	1,449,000	828,000	10,350,000
		12 Pemasangan Fiksasi Interna	4,600,000	2,576,000	1,288,000	736,000	9,200,000
		13 Pemasangan Pintasan VA /VP Shunt	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		14 Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	2,875,000	1,610,000	805,000	460,000	5,750,000
		15 Rekontruksi Meningokel					
		a. Kranial (anterior/posterior)	5,175,000	2,898,000	1,449,000	828,000	10,350,000
		b. Spina Bifida	5,175,000	2,898,000	1,449,000	828,000	10,350,000
		16 Simple Fungtional Nsurgery					
		a. Percutaneous Rhizotomiy PRGR	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		b. Perc Facet Denervation dll	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		17 Ventrikustomi / VE Drainase	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
IX	THT	1 Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		2 Glosektomi Total	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		3 Laringektomi	1,725,000	966,000	483,000	276,000	3,450,000
		4 Myocutaneus Flap /Pectoral Mayor	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		5 Radikal Neck Desction	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		6 Stapendektomi	1,725,000	966,000	483,000	276,000	3,450,000
		7 Temporal Bone Resection	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		8 Timpano Plasti	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
X	Urologi	1 Adrenalektomi Abdominotorakal	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		2 Bladder Neck Incision	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		3 Diseksi KGB Pelvis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		4 Divertikulektomi Vesika	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		5 Epididimovasoktomi	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		6 Eksplorasi Testis Mikro Surgery	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		7 Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		8 Horseshoe Kidney Koreksi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		9 Ileal Condoit (Brikker)	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		10 Limfadenektomi Ileoinguinal	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		11 Limfadenektomi Retroperitoneal	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		12 Longitudinal Nefrolithotomi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		13 Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		14 Nefrektomi Partial	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		15 Nefro Urektomi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		16 Nefrostomi Perkutan	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		17 Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		18 Radikal Cystektomi	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		19 Radikal Nefrektomi	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		20 Radikal Prostatektomi	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		21 Rekonstruksi Renovaskuler	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		22 Repair Vesico Vagina Fistel Complex	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		23 RPLND	4,025,000	2,254,000	1,127,000	644,000	8,050,000
		24 TUR Prostat	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		25 TUR Tumor Buli - Buli	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		26 Ureteroneo Cystosthomi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		27 Uretroplasty	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		28 URS	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
XI	Vaskuler	1 Aneurisma Aorta	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		2 Arteri Carotis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		3 Arteri Renalis Stenosis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		4 Grating Pada Arterial Insufisiensi	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		5 Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Tehnik Operasi Khusus	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		6 Shunting :	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		a. Femoralis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		b. Poplitea / Tibialis	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000
		c. Splenomegali	2,300,000	1,288,000	644,000	368,000	4,600,000

E.2.4.3 Kelas I

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
				DOKTER	ANASTESI	PERAWAT	
I	Anak	1 Atesia Esofagus	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		2 Dunamel	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		3 PSA	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		4 Splenokomi Parsial	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
II	Digestif	1 Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		2 Koledoko Jejunoskomi	3,125,000	1,750,000	875,000	500,000	6,250,000
		3 Laparaskopik Kolisistektomi	3,125,000	1,750,000	875,000	500,000	6,250,000
		4 Mega Kolon Hierchprung	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		5 Miles Operation	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		6 Pangkrektetomi	3,125,000	1,750,000	875,000	500,000	6,250,000
		7 Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		8 Reseksi Hepar	3,125,000	1,750,000	875,000	500,000	6,250,000
		9 Spleneektomi	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
III	Kebidanan / Obgyn	1 Debulking	3,125,000	1,750,000	875,000	500,000	6,250,000
		2 Histerektomy Radikal	3,750,000	2,100,000	1,050,000	600,000	7,500,000
		3 Laparaskopiy Operatif	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		4 Operasi Tumor Ganas Ovarium	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		5 Surgical Staging	3,125,000	1,750,000	875,000	500,000	6,250,000
		6 Vulvektomi	3,750,000	2,100,000	1,050,000	600,000	7,500,000

V	Onkology	7	Tripel Produser Keratoplasti dengan Galaukoma	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		8	Rekonstruksi Saket Berat	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		9	Vitrektomi	1,875,000	1,050,000	525,000	300,000	3,750,000
		1	Diseksi Kelenjar Inguinal	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		2	Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		4	Glosektomi Totalis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		5	Hemiglosektomi + RND	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		6	Hemipelvektomi	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		7	Maksilektomi Totalis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		8	Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		9	Mandibulektomi Totalis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
VI	Ortopedi	10	Mastektomi Radikal	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		12	Pembedahan Forequarter	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		1	Amputasi Forequarter	1,875,000	1,050,000	525,000	300,000	3,750,000
		2	Amputasi Hind Quarter	1,875,000	1,050,000	525,000	300,000	3,750,000
		3	Arthroscopy	1,875,000	1,050,000	525,000	300,000	3,750,000
		4	Fraktur Yang Kompleks (Fraktur Asetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		5	Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) Tidak Termasuk Alat	1,875,000	1,050,000	525,000	300,000	3,750,000
VII	Plastik	6	Microsurgery	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		7	Scoliosis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		8	Spondilitis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		1	Faraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		2	Free Flap Surgery	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		3	Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
VIII	Saraf	4	Le-Ford Advancemen Surgery	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		5	Orthognatic Surgery	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		6	Replantasi	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		1	Complicated Functional Neuro :					
		a.	Stereotaxy Sederhana	7,812,500	4,375,000	2,187,500	1,250,000	15,625,000
		b.	Stereotaxy Kompleks	8,750,000	4,900,000	2,450,000	1,400,000	17,500,000
		c.	Percutaneous Kordotomi	6,562,500	3,675,000	1,837,500	1,050,000	13,125,000
		d.	P.Paraverteb / Visceral Block	5,625,000	3,150,000	1,575,000	900,000	11,250,000
		2	Dekompresi Syaraf Tepi	4,062,500	2,275,000	1,137,500	650,000	8,125,000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
		a.	Operasi Kurang 1 Jam	4,062,500	2,275,000	1,137,500	650,000	8,125,000
		b.	Operasi Lebih 1 Jam	4,687,500	2,625,000	1,312,500	750,000	9,375,000
		5	Kraniotomi + Bedah Mikro					
		a.	Operasi Kurang 4 Jam	7,187,500	4,025,000	2,012,500	1,150,000	14,375,000
		b.	Operasi Lebih 4 Jam	8,125,000	4,550,000	2,275,000	1,300,000	16,250,000
		6	Kraniotomi + Endoskopi	7,187,500	4,025,000	2,012,500	1,150,000	14,375,000
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur					
		a.	Operasi Kurang 4 Jam	5,625,000	3,150,000	1,575,000	900,000	11,250,000
		b.	Operasi Lebih 4 Jam	6,562,500	3,675,000	1,837,500	1,050,000	13,125,000
		8	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional					
		a.	Operasi Kurang 4 Jam	5,625,000	3,150,000	1,575,000	900,000	11,250,000
		b.	Operasi Lebih 4 Jam	6,562,500	3,675,000	1,837,500	1,050,000	13,125,000
		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
		9.1	Bedah Mikro					
		a.	Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	8,437,500	4,725,000	2,362,500	1,350,000	16,875,000
		b.	N. Cranialis / Spinalis Perifer	7,187,500	4,025,000	2,012,500	1,150,000	14,375,000
		9.2	Bedah Konvensional	5,625,000	3,150,000	1,575,000	900,000	11,250,000
		10	Neurektomi / Neurolyse	4,062,500	2,275,000	1,137,500	650,000	8,125,000
		11	Operasi Tulang Punggung :					
		11.1	Fusi Korpus Vertebra					
		a.	Approach Posterior	7,812,500	4,375,000	2,187,500	1,250,000	15,625,000
		b.	Approach Anterior	5,625,000	3,150,000	1,575,000	900,000	11,250,000
		11.2	Laminektomi					
		a.	Sederhana	5,625,000	3,150,000	1,575,000	900,000	11,250,000
		b.	Kompleks	6,562,500	3,675,000	1,837,500	1,050,000	13,125,000
		11.3	Tomor Spinal					
		a.	Daerah Kranioplasti	7,812,500	4,375,000	2,187,500	1,250,000	15,625,000
		b.	Daerah Servikal	6,562,500	3,675,000	1,837,500	1,050,000	13,125,000
		c.	Daerah Torakolumbal	5,625,000	3,150,000	1,575,000	900,000	11,250,000
		12	Pemasangan Fiksasi Interna	5,000,000	2,800,000	1,400,000	800,000	10,000,000
		13	Pemasangan Pintasan VA /VP Shunt	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	3,125,000	1,750,000	875,000	500,000	6,250,000
		15	Rekontruksi Meningokel					
		a.	Kranial (anterior/posterior)	5,625,000	3,150,000	1,575,000	900,000	11,250,000
		b.	Spina Bifida	5,625,000	3,150,000	1,575,000	900,000	11,250,000
		16	Simple Functional Nsurgery					
		a.	Percutaneous Rhizotomi PRGR	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		b.	Perc Facet Denervation dll	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		17	Ventrikustomi / VE Drainase	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
IX	THT	1	Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		2	Glosektomi Total	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000

		2	Bladder Neck Incision	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		3	Diseksi KGB Pelvis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		4	Divertikulektomi Vesika	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		5	Epididimovasoktomi	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		6	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		8	Horseshoe Kidney Koreksi	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		9	Ileal Conduit (Brikker)	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		12	Longitudinal Nefrolithotomi	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		13	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		14	Nefrektomi Partial	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		15	Nefro Urektomi	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		16	Nefrostomi Perkutan	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		17	Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		18	Radikal Cystektomi	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		19	Radikal Nefrektomi	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		20	Radikal Prostatektomi	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		21	Rekonstruksi Renovaskuler	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		22	Repair Vesico Vagina Fistel Complex	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		23	RPLND	4,375,000	2,450,000	1,225,000	700,000	8,750,000
		24	TUR Prostat	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		25	TUR Tumor Buli - Buli	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		26	Ureteroneo Cystostomi	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		27	Uretroplasty	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		28	URS	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
XI	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		2	Arteri Carotis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		3	Arteri Renalis Stenosis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		4	Grating Pada Arterial Insufisiensi	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		5	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Tehnik Operasi Khusus	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
		6	Shunting :	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
			a. Femoralis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
			b. Poplitea / Tibialis	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000
			c. Splenomegali	2,500,000	1,400,000	700,000	400,000	5,000,000

E.2.4.4 VIP / VIP Khusus

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
				DOKTER	ANASTESI	PERAWAT	
I	Anak	1 Atresia Esofagus	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		2 Dunamel	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		3 PSA	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		4 Splenokomi Parsial	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
II	Digestif	1 Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		2 Koledoko Jejunoskomi	3,375,000	1,890,000	945,000	540,000	6,750,000
		3 Laparoskopik Kolisistektomi	3,375,000	1,890,000	945,000	540,000	6,750,000
		4 Mega Kolon Hierchprung	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		5 Miles Operation	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		6 Pangkreketetomi	3,375,000	1,890,000	945,000	540,000	6,750,000
		7 Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		8 Reseksi Hepar	3,375,000	1,890,000	945,000	540,000	6,750,000
		9 Spleneektomi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
III	Kebidanan / Obgyn	1 Debulking	3,375,000	1,890,000	945,000	540,000	6,750,000
		2 Histerektomy Radikal	4,050,000	2,268,000	1,134,000	648,000	8,100,000
		3 Laparaskopiy Operatif	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		4 Operasi Tumor Ganas Ovarium	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		5 Surgical Staging	3,375,000	1,890,000	945,000	540,000	6,750,000
		6 Vulvektomi	4,050,000	2,268,000	1,134,000	648,000	8,100,000
IV	Mata	1 Ablatio Retina	2,025,000	1,134,000	567,000	324,000	4,050,000
		2 Dekompresi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		3 Fraktur Tripodo / Multipele	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		4 Orbitomi Lateral	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		5 Rekonstruksi Kelopak Mata	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		6 Rekonstruksi Orbita Congenital	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		7 Tripel Produser Keratiplasti dengan Galaukoma	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		8 Rekonstruksi Saket Berat	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		9 Vitrektomi	2,025,000	1,134,000	567,000	324,000	4,050,000
V	Onkology	1 Deseksi Kelenjar Inguinal	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		2 Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		3 Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		4 Glosektomi Totalis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		5 Hemiglosektomi + RND	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		6 Hemipelvektomi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		7 Maksilektomi Totalis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		8 Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		9 Mandibulektomi Totalis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		10 Mastektomi Radikal	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		11 Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		12 Pembedahan Forequarter	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
VI	Ortopedi	1 Amputasi Forequarter	2,025,000	1,134,000	567,000	324,000	4,050,000
		2 Amputasi Hind Quarter	2,025,000	1,134,000	567,000	324,000	4,050,000

		7	Scoliosis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		8	Spondilitis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
VII	Plastik	1	Faraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		2	Free Flap Surgery	4,725,000	2,646,000	1,323,000	756,000	9,450,000
		3	Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		4	Le-Ford Advancemen Surgery	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		5	Orthognatic Surgery	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		6	Replantasi	4,725,000	2,646,000	1,323,000	756,000	9,450,000
VIII	Saraf	1	Complicated Functional Neuro :					
			a. Stereotaxy Sederhana	8,437,500	4,725,000	2,362,500	1,350,000	16,875,000
			b. Stereotaxy Kompleks	9,450,000	5,292,000	2,646,000	1,512,000	18,900,000
			c. Percutaneous Kortotomi	7,087,500	3,969,000	1,984,500	1,134,000	14,175,000
			d. P.Paraverteb / Vicerat Block	6,075,000	3,402,000	1,701,000	972,000	12,150,000
		2	Dekompresi Syaraf Tepi	4,387,500	2,457,000	1,228,500	702,000	8,775,000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
			a. Operasi Kurang 1 Jam	4,387,500	2,457,000	1,228,500	702,000	8,775,000
			b. Operasi Lebih 1 Jam	5,062,500	2,835,000	1,417,500	810,000	10,125,000
		5	Kraniotomi + Bedah Mikro					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	7,762,500	4,347,000	2,173,500	1,242,000	15,525,000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	8,775,000	4,914,000	2,457,000	1,404,000	17,550,000
		6	Kraniotomi + Endoskopi	7,762,500	4,347,000	2,173,500	1,242,000	15,525,000
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	6,075,000	3,402,000	1,701,000	972,000	12,150,000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	7,087,500	3,969,000	1,984,500	1,134,000	14,175,000
		8	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	6,075,000	3,402,000	1,701,000	972,000	12,150,000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	7,087,500	3,969,000	1,984,500	1,134,000	14,175,000
		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
			9.1 Bedah Mikro					
			a. Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	9,112,500	5,103,000	2,551,500	1,458,000	18,225,000
			b. N. Cranialis / Spinalis Perifer	7,762,500	4,347,000	2,173,500	1,242,000	15,525,000
			9.2 Bedah Konvensional	6,075,000	3,402,000	1,701,000	972,000	12,150,000
		10	Neurektomi / Neurolise	4,387,500	2,457,000	1,228,500	702,000	8,775,000
		11	Operasi Tulang Punggung :					
			11.1 Fusi Korpus Vertebra					
			a. Approach Posterior	8,437,500	4,725,000	2,362,500	1,350,000	16,875,000
			b. Approach Anterior	6,075,000	3,402,000	1,701,000	972,000	12,150,000
			11.2 Leminektomi					
			a. Sederhana	6,075,000	3,402,000	1,701,000	972,000	12,150,000
			b. Kompleks	7,087,500	3,969,000	1,984,500	1,134,000	14,175,000
			11.3 Tomor Spinal					
			a. Daerah Kranioplasti	8,437,500	4,725,000	2,362,500	1,350,000	16,875,000
			b. Daearah Servikal	7,087,500	3,969,000	1,984,500	1,134,000	14,175,000
			c. Daerah Torakolumbal	6,075,000	3,402,000	1,701,000	972,000	12,150,000
		12	Pemasangan Fiksasi Interna	5,400,000	3,024,000	1,512,000	864,000	10,800,000
		13	Pemasangan Pintasan VA /VP Shunt	4,725,000	2,646,000	1,323,000	756,000	9,450,000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	3,375,000	1,890,000	945,000	540,000	6,750,000
		15	Rekontruksi Meningokel					
			a. Kranial (anterior/posterior)	6,075,000	3,402,000	1,701,000	972,000	12,150,000
			b. Spina Bifida	6,075,000	3,402,000	1,701,000	972,000	12,150,000
		16	Simple Fungtional Nsurgery					
			a. Percutaneous Rhizotomi PRGR	4,725,000	2,646,000	1,323,000	756,000	9,450,000
			b. Perc Facet Denervation dll	4,725,000	2,646,000	1,323,000	756,000	9,450,000
		17	Ventrikustomi / VE Drainase	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
IX	THT	1	Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		2	Glosektomi Total	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		3	Laringektomi	2,025,000	1,134,000	567,000	324,000	4,050,000
		4	Myocutaneus Flap /Pectoral Mayor	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		5	Radikal Neck Desction	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		6	Stapendektomi	2,025,000	1,134,000	567,000	324,000	4,050,000
		7	Temporal Bone Resection	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		8	Timpano Plasti	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
X	Urologi	1	Adrenaektomi Abdominotorakal	4,725,000	2,646,000	1,323,000	756,000	9,450,000
		2	Bladder Neck Incision	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		3	Diseksi KGB Pelvis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		4	Divertikulektomi Vesika	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		5	Epididimovasoktomi	4,725,000	2,646,000	1,323,000	756,000	9,450,000
		6	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		8	Horseshoe Kidney Koreksi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		9	Ileal Condoit (Brikker)	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		12	Longitudinal Nefrolithotomi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		13	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		14	Nefrektomi Partial	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		15	Nefro Urektektomi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		16	Nefrostomi Perkutan	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		17	Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		18	Radikal Cystektomi	4,725,000	2,646,000	1,323,000	756,000	9,450,000

		26	Ureteroneo Cystostomi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		27	Uretroplasty	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		28	URS	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
XI	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		2	Arteri Carotis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		3	Arteri Renalis Stenosis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		4	Grating Pada Arterial Insufisiensi	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		5	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Tehnik Operasi Khusus	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
		6	Shunting :	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
			a. Femoralis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
			b. Poplitea / Tibialis	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000
			c. Splenomegali	2,700,000	1,512,000	756,000	432,000	5,400,000

F. PELAYANAN PERSALINAN

F.1 Persalinan Normal

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	BIDAN	
1	Kelas III	120,000	135,000	45,000	300,000
2	Kelas II	187,500	140,625	46,875	375,000
3	Kelas I	200,000	150,000	50,000	400,000
5	VIP, VIP Khusus	250,000	187,500	62,500	500,000

F.2 Persalinan Dengan Penyulit

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	BIDAN	
1	Kelas III	200,000	225,000	75,000	500,000
2	Kelas II	312,500	234,375	78,125	625,000
3	Kelas I	325,000	243,750	81,250	650,000
5	VIP, VIP Khusus	350,000	262,500	87,500	700,000

F.3 Persalinan Per abdominal

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				JUMLAH
			DOKTER	ANESTESI	Dr. Anak	PERAWAT	
	Kelas III	450,000	504,000	252,000	147,000	147,000	1,500,000
	Kelas II	750,000	540,000	270,000	157,500	157,500	1,875,000
	Kelas I	780,000	561,600	280,800	163,800	163,800	1,950,000
	VIP, VIP Khusus	840,000	604,800	302,400	176,400	176,400	2,100,000

G. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

G.1 Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana / Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	TERAFIS	
1	Kelas III	5,400	5,280	1,320	12,000
2	Kelas II	7,500	6,000	1,500	15,000
3	Kelas I	8,000	6,400	1,600	16,000
4	VIP, VIP Khusus	10,000	8,000	2,000	20,000

G.2 Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	TERAFIS	
1	Kelas III	5,850	5,720	1,430	13,000
2	Kelas II	8,000	6,400	1,600	16,000
3	Kelas I	9,000	7,200	1,800	18,000
4	VIP, VIP Khusus	12,500	10,000	2,500	25,000

G.3 Pelayanan Rehabilitasi Medik Besar

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	TERAFIS	
1	Kelas III	9,000	8,800	2,200	20,000
2	Kelas II	12,500	10,000	2,500	25,000
3	Kelas I	13,500	10,800	2,700	27,000
4	VIP, VIP Khusus	15,000	12,000	3,000	30,000

G.4 Pelayanan Rehabilitasi Medik Canggih

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	TERAFIS	
1	Kelas III	11,250	11,000	2,750	25,000
2	Kelas II	15,000	12,000	3,000	30,000
3	Kelas I	17,500	14,000	3,500	35,000
4	VIP, VIP Khusus	20,000	16,000	4,000	40,000

H. PELAYANAN HEMODIALISA

H.1 Pelayanan Hemodialisa New

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
1	Kelas III, II, Rawat Jalan	420,000	108,000	72,000	600,000
2	Kelas I	490,000	126,000	84,000	700,000
3	VIP, VIP Khusus	560,000	144,000	96,000	800,000

H.2 Pelayanan Hemodialisa Re Use

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	REUSE	
1	Kelas III, II, Rawat Jalan	330,000	110,000	77,000	33,000	550,000
2	Kelas I	390,000	130,000	104,000	39,000	650,000
3	VIP, VIP Khusus	450,000	150,000	120,000	45,000	750,000

I. PELAYANAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	DOKTER	JUMLAH
	Kelas III / Isolasi	10,000	10,000
	Kelas II	15,000	15,000
	Kelas I	17,500	17,500
	VIP, VIP Khusus	30,000	30,000
	ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	35,000	35,000

J. PELAYANAN MEDIK GIGI & MULUT, PEMERIKSAAN, TINDAKAN MEDIK, DAN REHABILITASI GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
	1. Operasi kecil gigi	21,800	26,160	6,540	54,500
	2. Perawatan gigi	10,400	12,480	3,120	26,000
	3. Ekstraksi gigi komplikasi	13,600	16,320	4,080	34,000
	4. Ekstraksi gigi biasa	12,000	14,400	3,600	30,000
	5. Penambahan tetap	14,800	17,760	4,440	37,000
	6. Penambahan sinar	37,400	44,880	11,220	93,500
	7. Perawatan fraktur rahang	56,600	67,920	16,980	141,500
	8. Odontektomi, Alveolektomi	126,600	151,920	37,980	316,500
	9. Skaling	12,400	14,880	3,720	31,000
	10. Eksisi Epulis				
	- Kecil	21,800	26,160	6,540	54,500
	- Sedang	33,600	40,320	10,080	84,000
	- Besar	45,200	54,240	13,560	113,000
	11. Endodontik	11,400	13,680	3,420	28,500
	12. Rehabilitasi gigi dan mulut				
	- Gigi Pertama	81,200	97,440	24,360	203,000
	- Gigi Selanjutnya/buah	26,800	32,160	8,040	67,000

K. PELAYANAN MEDICO-LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
	1. Visum et Revertum (Pemeriksaan Luar)	10,000	12,000	2,400	25,000
	2. Otopsi (Bedah Jenazah)	200,000	240,000	48,000	500,000
	3. Visum Peserta Asuransi	10,000	12,000	2,400	25,000

L. PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
	1 Perawatan Jenazah	40,000	48,000	9,600	100,000
	2 Penyimpanan Panas (Biasa)	6,000	7,200	1,440	15,000
	3 Penyimpanan dengan Pendingin	60,000	72,000	14,400	150,000
	4 Pengawetan	80,000	96,000	19,200	200,000

M. ASUHAN KEPERAWATAN

M.1 Self Care

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			PERAWAT	
1	Kelas III	1,200	2,800	4,000
2	Kelas II/IRD/Kelas Khusus	1,800	4,200	6,000
3	Kelas I	2,400	5,600	8,000
4	VIP	3,000	7,000	10,000
5	VIP Khusus	4,500	10,500	15,000

M.1 Partial Care

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			PERAWAT	
1	Kelas III	1,500	3,500	5,000
2	Kelas II/IRD/Kelas Khusus	2,100	4,900	7,000
3	Kelas I	2,700	6,300	9,000
4	VIP	3,600	8,400	12,000
5	VIP Khusus	5,400	12,600	18,000
5	ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	4,500	10,500	15,000

M.1 Total Care

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			PERAWAT	
1	Kelas III	2,100	4,900	7,000
2	Kelas II/IRD/Kelas Khusus	3,000	7,000	10,000
3	Kelas I	3,600	8,400	12,000
4	VIP	4,500	10,500	15,000
5	VIP Khusus	5,400	12,600	18,000
5	ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	4,500	10,500	15,000

4	VIP	4,500	10,500	15,000
5	VIP Khusus	6,000	14,000	20,000
5	ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	5,400	12,600	18,000

N. PELATIHAN, DIKLAT, PRAKTEK MAHASISWA

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA	JUMLAH
	Perbulan x setiap orang	50,000	50,000

O. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

O.1 PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas Khusus/Isolasi	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP/ICU	VIP Khusus
1	PELAYANAN GIZI	1,000	1,000	1,000	2,000	3,500	5,000

O.2 Pelayanan Oksigen

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	Oksigen	10,000	10.000/Jam
2	N2O	75,000	75.000/Pasien

O.3 Pelayanan Mobil Ambulance / Laundry

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Mobil Ambulance			
	Dalam Kota (PP)	40,000	10,000	50,000
	Luar kota per KM(PP)	3,200	800	4,000
2	Mobil Jenazah			
	Dalam Kota	40,000	10,000	50,000
	Luar kota per KM(P)	4,000	1,000	5,000
	Tunggu perjam	8,000	2,000	10,000
3	Pelayanan Laundry	3,000	2,000	5,000

O.4 Pelayanan Adminitrasi Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	Kelas III	5,000	5,000
2	Kelas II	6,000	6,000
3	Kelas I	7,000	7,000
4	VIP/ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	10,000	10,000
5	VIP Khusus	18,000	18,000

O.5 PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA		JUMLAH
			DOKTER	FARMASI	
1	Harga Jual Obat/BHP 100% = Harga Beli (Harga Obat Ditetapkan = Harga Beli + 25%) Keuntungan maksimum	117%	2%	6%	125%

O.6 TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			DOKTER	PERAWAT	
	100% = BPPD	115%	5%	5%	125%

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

LAMPIRAN I.B. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

PERIHAL : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS & JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1	2	3	4
1	Pelayanan Puskesmas Rawat Inap ditetapkan sebagai berikut:		
	1 Biaya catatan medik penderita		
	2 Biaya Visite	Rp. 2.500,-	
	3 Biaya suntikan	Rp. 8.500,-	
	4 Biaya rawatan per hari:	Rp. 3.000,-	
	a. Bangsal	Rp. 10.000,-	
	b. Kelas	Rp. 15.000,-	
	5 Biaya obat dan bahan/alat habis pakai sesuai ketentuan		
	6 Biaya tindakan di semua unit rawat jalan dan rawat inap sebagai berikut:		
	a. Kateterisasi :	Rp. 10.000,-	
	b. Spal Gips :	Rp. 5.000,-	
	c. Jahit Luka dihitung perjahitan :	Rp. 5.000,-	
	d. Jahit Luka dengan penyulit per jahitan	Rp. 17.000,-	
	e. Incisi tanpa anastesi	Rp. 5.000,-	
	f. Perawatan luka ringan	Rp. 5.000,-	
	g. Perawatan luka berat	Rp. 10.000,-	
	h. Lavermen rendah	Rp. 4.000,-	
	i. Maag slang	Rp. 5.000,-	
	j. Ransel verband	Rp. 5.000,-	
	k. Cirkumsisi Dokter Umum	Rp. 50.000,-	
	m. Cirkumsisi oleh Perawat	Rp. 30.000,-	
	n. Pemasangan infuse	Rp. 10.000,-	
	o. Pemasangan oksigen (O2)	Rp. 5.000,-	
	p. Pengeluaran benda asing (hidung, Telinga)	Rp. 10.000,-	
2	Pemeriksaan Kesehatan:		
	a. Pelajar dan mahasiswa	Rp. 5.000,-	
	b. Mendapatkan pekerjaan	Rp. 10.000,-	
	c. Calon pengantin per orang	Rp. 10.000,-	
	d. Karyawan perusahaan	Rp. 10.000,-	
	e. Pengangkatan pegawai negeri	Rp. 15.000,-	
	f. Keperluan Asuransi	Rp. 15.000,-	
	g. Surat Keterangan Sakit PNS	Rp. 10.000,-	
	h. Surat Keterangan Sakit Pegawai Swasta	Rp. 15.000,-	
3	Persalinan dengan penyulit:		
	a Dokter	Rp. 100.000,-	
	b Bidan/Perawat	Rp. 75.000,-	
4	Resusitasi Bayi	Rp. 5.000,-	
5	Pemeriksaan USG	Rp. 25.000,-	
6	Rawat Inap Perhari:		
	a Bangsal	Rp. 10.000,-	
	b Kelas	Rp. 15.000,-	
7	Pemasangan IUD	Rp. 25.000,-	
8	Pemasangan Implant	Rp. 50.000,-	
9	Aff Implant / IUD	Rp. 75.000,-	
10	Bayi baru lahir dikenakan tarif sebesar 50% dari bangsal atau kelas dimana ibunya dirawat.	50%	
11	Tarif retribusi tindakan di bangsal bersalin:		
	a Persalinan normal oleh dokter umum dipuskesmas perawatan	Rp. 22.500,-	
	b Persalinan normal oleh bidan dipuskesmas perawatan	Rp. 12.400,-	
12	Tindakan di unit pelayanan mandiri gigi dan mulut dari puskesmas		
	a. Penambalan gigi dengan :		

1	2	3	4
	b. Pengobatan urat syaraf gigi per kunjungan	Rp. 17.500,-	
	c. Pengobatan gangrene per gigi per kunjungan	Rp. 20.000,-	
	d. Pengobatan kecil lainnya	Rp. 10.000,-	
	e. Ekstrasi gigi per satuan gigi:		
	1) Gigi sulung	Rp. 20.000,-	
	2) Gigi tetap	Rp. 30.000,-	
	3) Gigi komplikasi	Rp. 50.000,-	
	f. Tindakan-tindakan lain:		
	1) Pembersihan karang gigi per rahang	Rp. 25.000,-	
	2) Pembedahan gigi tertahan	Rp. 50.000,-	
	g. Tarif bahan dan alat yang ditentukan sebesar harga bahan dan alat sesuai faktur pembelian terakhir ditambah jasa sarana sebesar 30 %.	30%	
13	Besarnya tarif retribusi visum et repertum:		
	a. Untuk visum Et Revertum (Pemeriksaan luar) Oleh Dokter	Rp. 22.500,-	
	b. Untuk visum Et Revertum (Pemeriksaan luar) Oleh Perawat	Rp. 12.400,-	

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

LAMPIRAN I.C PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO.	JENIS OBYEK PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
I	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN		
1	Tindakan Medis Ringan		
a	Debriedmen	bahan/obat/tindakan	Rp 15,000
b	Cabut Gigi	bahan/obat/tindakan	Rp 15,000
c	Potong ekor	bahan/obat/tindakan	Rp 15,000
d	Pemeriksaan kebuntingan hewan kecil	bahan/obat/tindakan	Rp 15,000
e	Insisi Abses	bahan/obat/tindakan	Rp 15,000
2	Tindakan Medis Sedang		
a	Partus spontan hewan kecil	bahan/obat/tindakan	Rp 25,000
b	Penanganan Haematoma	bahan/obat/tindakan	Rp 25,000
c	Kastrasi hewan kecil	bahan/obat/tindakan	Rp 25,000
3	Tindakan Medis Berat		
a	Retensio Secundinae Hewan Besar	bahan/obat/tindakan	Rp 40,000
b	Prolapsus Hewan Besar	bahan/obat/tindakan	Rp 40,000
c	Sectio Caesaria Hewan Besar	bahan/obat/tindakan	Rp 40,000
d	Sectio Caesaria Hewan kecil	bahan/obat/tindakan	Rp 40,000
e	Ovariohysterectomi hewan kecil	bahan/obat/tindakan	Rp 40,000
f	Ovariectomy hewan kecil	bahan/obat/tindakan	Rp 40,000
II	PELAYANAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN		
1	Inseminasi Buatan	Dosis	Rp 5,000
2	Pemeriksaaan Kebuntingan	Ekor	Rp 2,500
3	Asistensi Teknis Reproduksi	Ekor	Rp 2,500
III	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET		
1	Uji Mikrobiologi	Sampel	Rp 4,000
2	Uji Formalin	Sampel	Rp 5,000
IV	PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN		
1	Darah rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan)	Sampel	Rp 1,500
2	Urin Rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan)	Sampel	Rp 1,500
3	Tinja Rutin (Untuk tiap jenis pemeriksaan)	Sampel	Rp 1,500
4	Uji Fisik dan Kualitas Sperma	Sampel	Rp 1,500
5	Kimia Klinik	Sampel	Rp 4,000
6	Kerokan kulit	Sampel	Rp 5,000
7	Faal Hemostatik (Trombosit)	Sampel	Rp 4,000
8	Serologi:		
a	Rose Bengal Test	Sampel	Rp 250
b	Ha-Hi ND	Sampel	Rp 250
c	Rapid Test AI	Sampel	Rp 2,500
9	Pemeriksaan Mikroskopik langsung	Sampel	Rp 5,000
V	LAIN-LAIN		
1	Kir Kesehatan Hewan		
a	Ternak Besar	Sampel	Rp 3,000
b	Ternak kecil (kambing, domba)	Sampel	Rp 2,000
c	Hewan Kesayangan (anjing, kucing, kelinci dll)	Sampel	Rp 5,000

1	2	3	4
3	Pemeriksaan Visum et Repertum (Visum Luar Bangkai/Kadaver)	Sampel	Rp 20,000
4	Otopsi (Bedah Bangkai):		
a	Hewan kecil	Sampel	Rp 75,000
b	Hewan Besar	Sampel	Rp 100,000

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	JENIS OBYEK PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga:		
	a Luas Bangunan < 36 M ²	Per Bulan	Rp 1,000
	b Luas Bangunan 36 M ² s/d 71M ²	Per Bulan	Rp 2,500
	c Luas Bangunan > 71 M ²	Per Bulan	Rp 5,000
2	Pengambilan, Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pertokoan, rumah makan dan restoran:		
	a Kecil (volume sampah < 0,51 m3/hari)	Per Bulan	Rp 7,500
	b Sedang (volume sampah 0,51m3 s/d 0,75 m3/hari)	Per Bulan	Rp 10,000
	c Besar (volume sampah 0, 76 m3 / hari)	Per Bulan	Rp 15,000
3	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain rumah sakit, hotel, pabrik dan losmen:		
	a Kecil (volume sampah < 0, 51 m3 s/d 0,75 m3 / hari)	Per Bulan	Rp 10,000
	b Sedang (volume sampah 0, 51 m3 s/d 0,75 m3 / hari)	Per Bulan	Rp 15,000
	c Besar (volume sampah 0,76 m3 / hari)	Per Bulan	Rp 20,000
4	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan di Pasar bagi Pedagang:		
	a Kecil (Volume sampah dibawah 0,25 m ³)	Per Hari Pasar	Rp 250
	b Sedang (Volume sampah 0,25 m3 s/d 0,50 m3 / hari)	Per Hari Pasar	Rp 500
5	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah kantor badan usaha, kantor pemerintah / swasta dan bangunan pergudangan:		
	a Kecil (luas bangunan < 71 m2)	Per Bulan	Rp 7,500
	b Sedang (luas bangunan 71 m2 s/d 300m2)	Per Bulan	Rp 10,000
	c Besar (luas bangunan > 300 M2)	Per Bulan	Rp 15,000
6	Untuk pemilik perusahaan angkutan umum, berdasarkan keterangan jumlah armada/mobil yang dioperasikan terhadap perusahaan angkutan umum di maksud.	Per Trayek	Rp 200
7	Untuk mobil angkutan barang, tarif berdasarkan bongkar muat di terminal lokasi yang telah ditentukan sebagai berikut:		
	a Dump Truck	Per Hari	Rp 2,500
	b Truck / Truck Box	Per Hari	Rp 2,500
	c Pick Up	Per Hari	Rp 1,000

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK & AKTA CAPIL

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Kartu Keluarga	Rp. 20.000,-	
2	Kartu Tanda Penduduk WNI	Rp. 20.000,-	
3	Kartu Tanda Penduduk WNA	Rp. 50.000,-	
4	Akta Perkawinan:		
	1) Kutipan Akta Perkawinan WNI (dicatat dalam kantor)	Rp. 100.000,-	
	2) Kutipan Akta Perkawinan WNA (dicatat dalam kantor)	Rp. 150.000,-	
	3) Kutipan Akta Perkawinan WNI (dicatat diluar kantor)	Rp. 250.000,-	
	4) Kutipan Akta Perkawinan WNA (dicatat diluar kantor)	Rp. 350.000,-	
	5) Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya tambahan sebesar:		
	a) Untuk WNI	Rp.150.000,-	
	b) Untuk WNA	Rp. 200.000,-	
	6) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya	Rp. 250.000,-	
5	Pengakuan dan Pengesahan Anak:		
	a. Kutipan Akta Pengakuan WNI	Rp. 100.000,-	
	b. Kutipan Akta Pengakuan WNA	Rp. 200.000,-	
	c. Pencatatan Pengesahan Anak WNI	Rp. 125.000,-	
	d. Pencatatan Pengesahan Anak WNA	Rp. 250.000,-	
	e. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya WNI	Rp. 150.000,-	
	f. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya WNA	Rp. 200.000,-	
6	Akta Perceraian:		
	a. Kutipan Akta Perceraian WNI	Rp. 100.000,-	
	b. Kutipan Akta Perceraian WNA	Rp. 200.000,-	
	c. Pencatatan Perceraian Melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri:	Rp. 100.000,-	
	1) Untuk WNI	Rp. 150.000,-	
	2) Untuk WNA	Rp. 200.000,-	
	d. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya:		
	1) Untuk WNI	Rp. 150.000,-	
	2) Untuk WNA	Rp. 350.000,-	
7	Akta Kematian:		

1	2	3	4
	c. Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kedua dan Seterusnya	Rp. 40.000,-	
8	Akta Ganti Nama	Rp. 50.000,-	

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR

NO.	JENIS/KELAS	SATUAN	TARIF
1	Pasar Kelas I setiap waktu pasaran :		
	a. Didalam Los terdiri dari :		
	1) Los Kelas I	M ²	Rp 750
	2) Los Kelas II	M ²	Rp 500
	b. Areal Pasar Di Luar Los	M ²	Rp 400
	c. Penggunaan Lahan Untuk Pedagang Keliling	hari	Rp 2,000
	d. Penggunaan Lahan Untuk Tenda	M ²	Rp 750
	e. Penggunaan Lahan Untuk Meja Jualan	M ²	Rp 500
	f. Pemanfaatan Lahan Untuk Pemilik Tenda Jualan	M ²	Rp 500
	g. Penggunaan Tenda Milik Pasar	hari	Rp 5,000
	h. Penggunaan Meja Jualan Milik Pasar	hari	Rp 3,000
	i. Kios	bulan	Rp 250,000
	j. Toko	bulan	Rp 500,000
2	Pasar Kelas II untuk setiap waktu pasaran:		
	a. Didalam Los terdiri dari :		
	1) Los Kelas I	M ²	Rp 750
	2) Los Kelas II	M ²	Rp 400
	b. Areal Pasar Di Luar Los	M ²	Rp 350
	c. Penggunaan Lahan Untuk Pedagang Keliling	hari	Rp 1,750
	d. Penggunaan Lahan Untuk Tenda	M ²	Rp 500
	e. Penggunaan Lahan Untuk Meja Jualan	M ²	Rp 400
	f. Pemanfaatan Lahan Untuk Pemilik Tenda Jualan	M ²	Rp 400
	g. Penggunaan Tenda Milik Pasar	hari	Rp 5,000
	h. Penggunaan Meja Jualan Milik Pasar	hari	Rp 3,000
	i. Kios	bulan	Rp 250,000
	j. Toko	bulan	Rp 500,000
3	Pasar Kelas III untuk setiap waktu pasaran:		
	a. Didalam Los terdiri dari :		
	1) Los Kelas I	M ²	Rp 500
	2) Los Kelas II	M ²	Rp 400
	b. Areal Pasar Di Luar Los	M ²	Rp 250
	c. Penggunaan Lahan Untuk Pedagang Keliling	hari	Rp 1,000
	d. Penggunaan Lahan Untuk Tenda	M ²	Rp 500
	e. Penggunaan Lahan Untuk Meja Jualan	M ²	Rp 400
	f. Pemanfaatan Lahan Untuk Pemilik Tenda Jualan	M ²	Rp 400
	g. Penggunaan Tenda Milik Pasar	hari	Rp 5,000
	h. Penggunaan Meja Jualan Milik Pasar	hari	Rp 3,000
	i. Kios	bulan	Rp 250,000
	j. Toko	bulan	Rp 500,000

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS OBYEK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Pengujian Berkala Pertama:		
a	Biaya Perjenis Kendaraan:		
1)	Pendaftaran Kendaraan Baru	Unit	Rp 35,000
2)	Mobil Bus	Unit	Rp 75,000
3)	Mobil Penumpang/Microlet/Sewa/Taksi	Unit	Rp 65,000
4)	Mobil barang:		
a)	Pick Up	Unit	Rp 65,000
b)	Truck:	Unit	Rp 65,000
1)	Truck (Roda Empat)	Unit	Rp 75,000
2)	Truck (Roda Enam)	Unit	Rp 95,000
3)	Dump Truck	Unit	Rp 125,000
4)	Fuso	Unit	
5)	Kendaraan Khusus	Unit	Rp 40,000
6)	Kendaraan Gandengan	Unit	Rp 35,000
7)	Kereta Tempelan	Unit	Rp 35,000
8)	Sepeda Motor yang disewakan	Unit	Rp 25,000
b	Mutasi Kendaraan Masuk	Unit	Rp 30,000
c	Buku Uji	Unit	Rp 15,000
d	Tanda Uji/pengesahan uji (plat uji)	Pasang	Rp 7,500
e	Plat Samping (stiker)	Pasang	Rp 22,500
2	Pengujian Berkala lanjutan (periodik) perpanjangan:		
a	Biaya Perjenis Kendaraan:		
1)	Mobil Bus	Unit	Rp 50,000
2)	Mobil penumpang/Microlet/Sewa/Taksi	Unit	Rp 44,000
3)	Mobil barang:		
a)	Pick Up	Unit	Rp 49,500
b)	Truck:	Unit	Rp 56,250
b	Mutasi Kendaraan Keluar	Unit	Rp 45,000
c	Ganti Buku Uji	Unit	Rp 15,000
d	Tanda Uji/pengesahan uji (plat uji)	Pasang	Rp 7,500
e	Plat Samping (stiker)	Pasang	Rp 22,500
3	Numpang Uji	Unit	Rp 15,000
4	Modifikasi (ubah bentuk/status)	Unit	Rp 37,500
5	Rekomendasi pengangkutan bagasi	Unit/6 Bulan	Rp 25,000

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS OBYEK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Pengujian Berkala Pertama:		
a	Biaya Perjenis Kendaraan:		
	1) Mobil Bus	Unit	Rp 75,000
	2) Mobil Penumpang/Microlet/Sewa/Taksi	Unit	Rp 65,000
	3) Mobil barang:		
	a) Pick Up	Unit	Rp 65,000
	b) Truck:	Unit	Rp 65,000
	1) Truck (Roda Empat)	Unit	Rp 75,000
	2) Truck (Roda Enam)	Unit	Rp 95,000
	3) Dump Truck	Unit	Rp 125,000
	4) Fuso	Unit	
	4) Kendaraan Khusus	Unit	Rp 40,000
	5) Kendaraan Gandengan	Unit	Rp 35,000
	6) Kereta Tempelan	Unit	Rp 35,000
	7) Sepeda Motor yang disewakan	Unit	Rp 25,000
b	Buku Uji	Unit	Rp 15,000
c	Tanda Uji/pengesahan uji (plat uji)	Pasang	Rp 7,500
d	Plat Samping (stiker)	Pasang	Rp 22,500
2	Pengujian Berkala lanjutan (periodik) perpanjangan:		
a	Biaya Perjenis Kendaraan:		
	1) Mobil Bus	Unit	Rp 50,000
	2) Mobil penumpang/Microlet/Sewa/Taksi	Unit	Rp 44,000
	3) Mobil barang:		
	a) Pick Up	Unit	Rp 49,500
	b) Truck:	Unit	Rp 56,250
b	Ganti Buku Uji	Unit	Rp 15,000
c	Tanda Uji/pengesahan uji (plat uji)	Pasang	Rp 7,500
d	Plat Samping (stiker)	Pasang	Rp 22,500

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**NOMOR : TAHUN 2011****TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK PETA**

NO.	JENIS CETAK PETA	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3		4
1	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	skala 1 : 50.000	Per Lembar	Rp 50,000
2	Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten	skala 1 : 25.000	Per Lembar	Rp 75,000
3	Peta Rencana Rincian/Teknis Ruang (RTR) Kabupaten	skala 1 : 20.000	Per Lembar	Rp 100,000
4	Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota atau Kawasan Perkotaan (RUTRK)	skala 1 : 50.000	Per Lembar	Rp 50,000
5	Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota atau Kawasan Perkotaan (RUTRK)	skala 1 : 20.000	Per Lembar	Rp 75,000
6	Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota atau Kawasan Perkotaan (RDTRK)	skala 1 : 5000	Per Lembar	Rp 100,000
7	Peta Rencana Teknis Ruang Kota atau Kawasan Perkotaan (RTRK)	skala 1 : 1000	Per Lembar	Rp 200,000
8	Peta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Master Plan Kawasan	skala 1 : 1000	Per Lembar	Rp 200,000
9	Peta Administrasi Kecamatan	skala 1 : 20.000	Per Lembar	Rp 100,000
10	Peta Administrasi Desa/Kelurahan	skala 1 : 20.000	Per Lembar	Rp 100,000
11	Penggantian Biaya Cetak Peta & Dokumen Pendukung Lainnya terhadap Usaha Pertanian, Perindustrian, Perdagangan & Jasa Pariwisata serta Penelitian	skala 1 : 50.000	Per Lembar	Rp 75,000

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,**
HAMIM POU

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO.	JENIS LAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Pengujian Laboratorium Untuk Limbah Cair:		
a	Rumah Tangga/Permukiman	Sampel	Rp 5,000
b	Industri	Sampel	Rp 15,000
c	Rumah Sakit	Sampel	Rp 15,000
d	Rumah Bersalin	Sampel	Rp 15,000
e	Politeknik/Farmasi	Sampel	Rp 10,000
f	Hotel	Sampel	Rp 10,000
2	Pemanfaatan Sarana Instalasi Pengolahan Limbah Cair:		
a	Permukiman/Real Estate		
1)	Permukiman ≤ 100	Bulan	Rp 500,000
2)	Permukiman ≥ 101	Bulan	Rp 750,000
b	Industri:		
1)	Industri Kecil	Bulan	Rp 150,000
2)	Industri Menengah	Bulan	Rp 350,000
3)	Industri Besar	Bulan	Rp 750,000
c	Rumah Sakit:		
1)	Rumah Sakit Type A	Bulan	Rp 750,000
2)	Rumah Sakit Type B	Bulan	Rp 400,000
3)	Rumah Sakit Type C	Bulan	Rp 250,000
4)	Rumah Sakit Type D	Bulan	Rp 150,000
d	Rumah Bersalin:		
1)	Kapasitas ≤ 10 Tempat Tidur	Bulan	Rp 350,000
2)	Kapasitas ≥ 11 Tempat Tidur	Bulan	Rp 500,000
e	Politeknik/Farmasi	Bulan	Rp 500,000
f	Hotel:		
1)	Hotel Melati/Penginapan	Bulan	Rp 100,000
2)	Hotel Bintang 1	Bulan	Rp 200,000
3)	Hotel Bintang 2	Bulan	Rp 300,000
4)	Hotel Bintang 3	Bulan	Rp 400,000
5)	Hotel Bintang 4	Bulan	Rp 450,000
6)	Hotel Bintang 5	Bulan	Rp 500,000
3	Pemanfaatan Tempat Pembuangan Limbah Cair:		
a	0 s/d 200 M ³	M ³ /Bulan	Rp 15
b	201 M ³ s/d 500 M ³	M ³ /Bulan	Rp 20
c	501 M ³ s/d 750 M ³	M ³ /Bulan	Rp 25
d	751 M ³ ke atas	M ³ /Bulan	Rp 30

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO.	JENIS OBYEK TERA/TERA ULANG	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Ukuran Panjang:		
	a Sampai dengan 2 m:		
	1) Meter dengan pegangan	Buah	Rp 1,000
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	Rp 3,000
	3) Meter saku baja	Buah	Rp 2,500
	4) Salib ukur	Buah	Rp 4,000
	5) Gaude block	Buah	Rp 5,000
	6) Micrometer	Buah	Rp 6,000
	7) Jangka sorong	Buah	Rp 6,000
	b Lebih dari 2 m samapi dengan 20 m		
	1) Tongkat duga	Buah	Rp 5,000
	2) Meter saku baja	Buah	Rp 2,000
	3) Ban ukur kundang	Buah	Rp 5,000
	4) Alat ukur tinggi orang	Buah	Rp 5,000
	5) Komparator	Buah	Rp 30,000
	6) Depth tape	Buah	Rp 10,000
2	Ukuran panjang dengan alat hitung (Counter meter)	Buah	Rp 10,000
	a Alat ukur Permukaan cairan (Level Gauge)		
	1) Mekanik	Buah	Rp 50,000
	2) Elektronik	Buah	Rp 100,000
	b Takaran (basah/kering)		
	1) Sampai dengan 2 L	Buah	Rp 1,000
	2) Lebih dari 2 L samapai 25 L	Buah	Rp 1,500
	3) Lebih dari 25 L	Buah	Rp 5,000
	c Tangki Ukur		
	1) Silinder Tegak		
	a) Sampai dengan 1.000 kl	Buah	Rp 100,000
	b) Lebih dari 1.000 kl dihitung sebagai berikut:		
	● 1000 kl pertama	buah	Rp 100,000
	● Selebihnya dari 1000 kl s/d 1000 kl, setiap 10 kl	Setipa 10 kl	Rp 1,500
	c) Selebihnya dari 1000 kl s/d 2000 kl, setiap 10 kl	Setipa 10 kl	Rp 1,000
	d) Selebihnya dari 2000 kl s/d 10000 kl, setiap 10 kl	Setipa 10 kl	Rp 1,500
	e) Selebihnya dari 10000 kl s/d 20000 kl, setiap 10 kl	Setipa 10 kl	Rp 1,400
	f) Selebihnya dari 20.000 kl setiap bagian bagian dari 10 kl dihitung satu 10 kl.	Setipa 10 kl	Rp 1,300
	2) Bentuk silinder datar		
	a) Sampai dengan 10 kl	Setipa 10 kl	Rp 250,000
	b) Lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
	● 10 kl pertama		Rp 250,000
	● Selebihnya dari 10 kl s/d 50 kl, setiap 10 kl	Setipa 10 kl	Rp 4,000
	● Selebihnya dari 50 kl sampai setiap 10 kl	Setipa 10 kl	Rp 2,000
	● Selebihnya dari 2000 kl s/d 10000 kl, setiap kl	Buah	Rp 2,000
	● Selebihnya dari 10000 kl s/d 20000 kl, setiap kl	Buah	Rp 2,000
	● Selebihnya dari 20.000 kl setiap bagian bagian dari kl dihitung 1 kl.	Buah	Rp 1,000
	3) Bentuk bola dan sperodil		
	a) Sampai dengan 500 kl	Buah	Rp 250,000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap kl	buah	Rp 500,000
	d Tangki ukuran gerak		
	1) Tangki ukuran mobil dan tangki ukuran wagon		
	a) Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	Rp 100,000
	b) Lebih dari 5 kl dihitung sbb :		
	● 5 kl pertama	buah	Rp 100,000
	● Selebihnya dari 5 kl	buah	Rp 20,000
	2) Tengki ukuran tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal.		
	a) Sampai dengan 50 kl	Buah	Rp 100,000
	b) Lebih dari 50 kl dihitung sbb :		
	● 50 kl pertama	Buah	Rp 100,000

1	2	3	4
	● Selebihnya 1000 kl sampai 5000 kl.	Buah	Rp 1,500
e	Alat Ukur dari Gelas		
	1) Labu ukur, Buret dan Dipet	Buah	Rp 10,000
	2) Gelas Ukur	Buah	Rp 7,500
f	Bejana Ukur		
	1) Sampai dengan 50 L	Buah	Rp 10,000
	2) Lebih dari 50 L s/d 200 L	Buah	Rp 15,000
	3) Lebih dari 200 L s/d 500 L	Buah	Rp 20,000
	4) Lebih dari 500 L s/d 1000 L	Buah	Rp 25,000
	5) Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L bagian dari 1000 L dihitung 1000 L	Buah	Rp 50,000
3	Meter Taksi	Buah	Rp 60,000
4	Speedo meter	Buah	Rp 50,000
5	Meter rem	Buah	Rp 15,000
6	Tacho meter	Buah	Rp 15,000
7	Termometer	Buah	Rp 15,000
8	Densimeter	Buah	Rp 6,000
9	Visiometer	Buah	Rp 6,000
10	Alat ukur luas	Buah	Rp 6,000
11	Alat ukur sudut	Buah	Rp 5,000
12	Alat ukur cairan minyak		
a	Meter induk Untuk setiap media uji		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	Rp 5,000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 25 m ³ /h	Buah	Rp 100,000
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	Rp 100,000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	Buah	Rp 4,000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	Rp 2,000
b	Meter kerja Untuk setiap media uji		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	Rp 1,000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 15 m ³ /h pertama	Buah	Rp 100,000
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	Rp 100,000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	Rp 2,000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	Rp 1,000
13	Tempat ukur LDH		
a	Untuk setiap nosel	Buah	Rp 100,000
b	Meter air	Buah	Rp 100,000
c	Meter kerja	Buah	Rp 1,000
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	Rp 2,500
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	Rp 10,000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	Rp 25,000
14	Meter Listrik ataw Meter Kwh		
a	Meter induk :		
	1) 3(tiga) phase	Buah	Rp 20,000
	2) 1(satu) phase	Buah	Rp 2,500
b	Meter kerja kelas 2 :		
	1) 3(tiga) phase	Buah	Rp 750
	2) 1(satu) phase	Buah	Rp 2,500
c	Meter kerja kelas 1, kelas 0,5		
	1) 3(tiga) phase	Buah	Rp 7,500
	2) 1(satu) phase	Buah	Rp 5,000
15	Stop Watch		
16	Anak timbangan		
a	Ketelitian sedang sedang dan biasa (m ² m ³)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp 1,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp 1,500
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	Rp 5,000
b	Ketelitian Halus (kelas f2 dan m2)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp 1,500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp 2,500
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	Rp 5,000
c	Ketelitian khusus (kelas F1 dan F2)		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp 5,500
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	Rp 8,500